

## BAB II

### KONDISI MASYARAKAT ACEH MENJELANG KEDATANGAN JEPANG

#### A. Kondisi Sosial Politik

Masyarakat Aceh pada awal abad ke-20 adalah masyarakat yang telah tercabik-cabik akibat perang Aceh yang panjang sejak 6 April 1873 sampai dengan tahun 1914. Kemenangan pemerintah kolonial Belanda dan kekalahan rakyat Aceh dalam perang itu menimbulkan luka dalam masyarakat. Problem pasca perang Aceh ini telah menyebabkan pemerintah Belanda menghadapi kesulitan untuk mendapatkan legitimasi kekuasaannya atas rakyat Aceh. Untuk memecahkannya, pemerintah kolonial harus mengulang sukses politik yang diraihinya di Jawa yaitu melalui kerja sama dengan para pemimpin adat yang dikenal dengan sebutan *uleebalang*.

Hubungan antara *uleebalang* dengan para birokrat Belanda sebenarnya adalah hubungan yang rumit dan penuh dengan ketegangan. Secara formal, hubungan itu menunjukkan ketundukan kaum *uleebalang*, namun demikian terdapat ketegangan-ketegangan dan tarik-menarik kepentingan. Di satu pihak Belanda berkepentingan terhadap kaum *uleebalang* untuk mendapatkan legitimasi kekuasaannya, karena hanya melalui lapisan sosial inilah mereka mempunyai instrument untuk mengendalikan Aceh. Sementara itu, kaum *uleebalang*,

berupaya memanfaatkan hubungan itu guna mendapatkan keuntungan dari kepentingan-kepentingan ekonomi politiknya.<sup>24</sup>

Belanda menggunakan seluruh cara untuk menghancurkan rakyat Aceh, termasuk politik *divide et impera* atau politik memecah belah. Mereka berusaha untuk mengadu domba antara rakyat dan *uleebalang*, dan antara *uleebalang* dan ulama.<sup>25</sup> Satu demi satu *uleebalang* dipaksa menandatangani perjanjian untuk tunduk di bawah kedaulatan Belanda, sehingga tinggal kelompok ulama yang berperan dalam memimpin perlawanan rakyat secara bergerilya.

Isi perjanjian ini secara singkat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa negeri yang dikepalai oleh *uleebalang* itu merupakan bagian dari Hindia Belanda dan berada di bawah kekuasaan Nederland,
2. Tidak mengadakan hubungan dengan negara-negara asing, dan
3. Tunduk pada perintah gubernur Aceh.<sup>26</sup>

Sejak peperangan mulai reda pada permulaan abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda merempuh suatu kebijaksanaan baru, yaitu menjadikan pemerintahan adat di Aceh sebagai bagian dalam struktur pemerintahannya. Daerah-daerah *uleebalang* yang mempunyai pemerintahan sendiri dalam struktur birokrasi kolonial Belanda dikenal dengan istilah Belanda *Zelfbesturende Landschappen*, dan *uleebalang* yang mengendalikan pemerintahan tradisional disebut *Zelfbestuurder*. Sebagai koordinatornya ditunjuk para asisten residen

---

<sup>24</sup> Al-Chaidar, Sayed Mudhahar Ahmad, dan Yarmen Dinamika, *Aceh Bersimbah Darah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 2-3.

<sup>25</sup> T. Syamsuddin, "Pasang Surut Kebudayaan Aceh" dalam Ismail Sunny (ed.), *Bunga Rampai Tentang Aceh* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1980), hlm. 131.

<sup>26</sup> Muhammad Ibrahim dkk., *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991), hlm. 155-156.

(kepala pemerintahan *Afdeling*) dan kontrolir (kepala pemerintahan *onderafdeeling*) yang berkebangsaan Belanda.<sup>27</sup>

Selain perjuangan bersenjata menentang kolonialisme Belanda, rakyat Aceh pun turut serta dalam perjuangan melalui pergerakan nasional. Derap langkah pergerakan nasional di Pulau Jawa menggema pula sampai kebelahan barat Nusantara. Di Aceh telah berdiri organisasi-organisasi modern, seperti: Sarekat Islam (SI), Syarikat Aceh Muda Setia, Syarikat Atjeh, Boedi Oetomo, Islam Mendjadi Satoe, *Insulinde*, dan Kongsi Atjeh Sumatera. Pada tahun-tahun berikutnya berdiri juga sejumlah organisasi, seperti: Muhammadiyah, Al-Muslim, Perkumpulan Usaha Sama Akan Kemajuan Anak (PUSAKA), *Jong Islamiten Bond* (JIB), Taman Siswa, Partai Indonesia Raya (Parindra), dan PUSA.<sup>28</sup> Melalui organisasi-organisasi itu, rakyat Aceh menyalurkan aspirasi politiknya. Sekalipun organisasi-organisasi yang ada bukan partai politik, mereka memuaskan keinginan politik mereka dengan cara lebih menonjolkan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial.

Sarekat Islam (SI) merupakan organisasi kebangsaan yang pertama didirikan di Aceh. SI adalah sebuah organisasi dagang Islam. Pada mulanya SI muncul di Tapak Tuan (Aceh Selatan) pada tahun 1916. Pelopor, pendiri, dan penggerak organisasi ini adalah kelompok *uleebalang* bersama kelompok ulama di daerah mereka masing-masing. Beberapa di antaranya ialah: Teuku Keujruen Chiek Muhammad Alibasyah, *uleebalang* Samalanga; Teungku Abdul Hamid, ulama dari Samalanga; Teuku Abdulhamid Orang Kaya Sri Maharaja, *uleebalang*

<sup>27</sup> Muhammad Ibrahim, *Pemerintahan Adat dan Pergerakan Nasional di Aceh* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985), hlm. 6.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

Lhok Seumawe; Teuku Chiek Muhammad Said, *uleebalang* Cunda; Teuku Abdullatif dari Geudong; dan Teuku Raja Bujang *uleebalang* Nisan Grugok. Tiga tahun kemudian SI telah menjadi partai politik dan mulai memperlihatkan gejala-gejala hendak melawan Belanda.<sup>29</sup> Untuk mematahkan perlawanan itu, pada tahun 1926 Belanda menangkap sejumlah pemimpin SI.

Pada tahun 1923, Muhammadiyah masuk ke Kutaraja, dibawa oleh bekas sekretaris Muhammadiyah cabang Betawi, S. Djaja Soekarta. Dibandingkan dengan organisasi-organisasi lain yang datang dari Jawa, Muhammadiyah merupakan organisasi yang relatif dapat hidup subur di Aceh.<sup>30</sup> Meskipun pimpinannya berada di tangan orang daerah, namun sebagian besar anggota-anggotanya adalah bukan orang Aceh. Untuk memenuhi aspirasi sosial dan politik, rakyat Aceh memasuki Muhammadiyah. Inilah sebabnya mengapa berlainan dengan Muhammadiyah di Jawa yang menitikberatkan kegiatannya pada keagamaan dan sosial. Muhammadiyah di Aceh selalu turut dalam gerakan politik.<sup>31</sup>

Pada tahun 1927, dengan bimbingan A. R. Sutan utusan dari pimpinan pusat Muhammadiyah, berdirilah cabang Muhammadiyah Kutaraja di bawah pimpinan R. O. Armadinata, dan T. Muhammad Hasan yang kemudian diangkat sebagai *consul Hoofdbestuur* Muhammadiyah yang pertama.<sup>32</sup>

Demikian juga dengan organisasi-organisasi yang lain. Pada tahun 1928 *Jong Islamiten Bond* (JIB) pada mulanya telah merencanakan untuk mendirikan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 8-9.

<sup>31</sup> Ibrahim Alfian, *Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah* (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1999), hlm. 204.

<sup>32</sup> Ibrahim, *Pemerintahan Adat*, hlm. 10.



sebuah cabang di Kutaraja, tetapi usaha itu belum berhasil. Barulah pada tahun 1930, dengan dukungan T. Nyak Arief (Panglima Sagi XXVI Mukim), cabang JIB dapat didirikan di Kutaraja, Sigli, Lhok Seumawe dan pada tanggal 6 Oktober 1932 di Sabang.

Pada tahun 1929 di Peureula berdiri Perkumpulan Usaha Sama Akan Kemajuan Anak (PUSAKA) untuk mendirikan sekolah rendah berbahasa Belanda. Pengurusnya tersusun sebagai berikut: pelindung T. Chik M. Thayeb, penasehat T. Tjut Ahmad, ketua T. M. Nurdin, penulis H. M. Zairuddin, bendahara M. Hasyim, serta komisaris-komisaris T. M. Hasan, T. Itam Usman, T. Sabi, dan Muhammad Syam.<sup>33</sup>

Awal tahun 1932 Perguruan Nasional Taman Siswa didirikan di Kutaraja dengan didahului oleh pembentukan panitia pendirinya yang diketuai oleh T. Muhammad Hasan Geulumpang Payong dan T. Nyak Arief sebagai wakil ketua.

Tahun 1939, Partai Indonesia Raya (Parindra) didirikan di Aceh. Salah seorang pendiri Parindra di daerah Aceh adalah Hamid Azwar, yang di masa remajanya banyak memberikan andil dan partisipasinya dalam mengembangkan pergerakan kebangsaan menuntut Indonesia merdeka. Kegiatan Parindra di Aceh adalah untuk menuntut Indonesia merdeka. Kegiatan tersebut telah cukup memusingkan *Politiek Inlichtingen Dienst* (PID) Polisi Rahasia Belanda. Parindra merupakan hasil peleburan Barisan Pemuda Indonesia (BPI) dan Budi Utomo di bawah pimpinan pusat Dr. Sutomo dan M. H. Thamrin.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Ibrahim dkk., *Sejarah Daerah*, hlm. 161.

<sup>34</sup> Jakobi, *Aceh*, hlm. 50-51.

Pada tanggal 5 Mei 1939 Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) didirikan di Peusangan, Bireuen, pantai utara Aceh.<sup>35</sup> Tgk. Muhammad Daud Beureueh, seorang pemimpin Islam terkemuka, yang lahir sekitar tahun 1900 di Beureueh, di distrik Keumangan, dekat Sigli, terpilih menjadi ketua komite pusat.<sup>36</sup> Tgk. Abd-Rahman Meunasah Meuntjap dari Peusangan terpilih menjadi wakil ketua.

Di antara faktor yang menyebabkan berdirinya PUSA adalah ketidakmampuan ulama untuk bekerja sama, terutama dalam bidang penyatuan kurikulum dan sistem pendidikan di Aceh ketika itu. Melalui organisasi ini, mereka ingin mengatur kembali dan menstandarisasikan kurikulum dan sistem seluruh madrasah yang telah dibangun di Aceh. Selain itu, adanya sejumlah *uleebalang* yang berlandung di bawah Belanda, sering bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Tindakan mereka terkadang bertentangan dengan ajaran agama. Namun demikian, yang paling penting adalah ulama ingin memperbaharui ajaran Islam dan memperkenalkan agama Islam dari segala jenis penyimpangan.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Shiraishi, "Pemerintahan Militer", hlm. 41.

<sup>36</sup> Cornelis van Dijk, *Darul Islam*, hlm. 256. Pengurus Besar PUSA terdiri dari:

- |               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Ketua I       | : Tgk. Muhammad Daud Beureueh        |
| Ketua II      | : Tgk. Abd-Rahman Meunasah Meuntjap  |
| Sekretaris I  | : Tgk. M. Nur el Ibrahimy            |
| Sekretaris II | : Tgk. Ismail Yakob                  |
| Bendahara     | : T.M. Amin                          |
| Komisaris     | : Tgk. Abd. Wahab Keunaloe Seulimeum |

-Tgk. Syekh Haji Abd. Hamid Samalanga  
 -Tgk. Usman Lampoh Awe  
 -Tgk. Yahya Baden Peudada  
 -Tgk. Maknud Simpang Lilim  
 -Tgk. Ahmad Damanhuri Takengon  
 -Tgk. M. Daud

-Tgk. Usman Aziz Lho' Sukon. Lihat Ismuha, "Ulama Aceh Dalam Perspektif Sejarah" dalam Taufik Ab lullah (ed.), *Agama dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 59-60.

<sup>37</sup> Amiruddin, *Perjuangan Ulama*, hlm. 51.

Pada awalnya PUSA merupakan organisasi yang berorientasi pada keagamaan yang bersifat modern. Usaha mereka lebih mengarah pada bidang dakwah dan perbaikan pendidikan bagi rakyat Aceh. Untuk maksud ini PUSA banyak mendirikan sekolah-sekolah, termasuk di antaranya Perguruan Normal Islam, yaitu sekolah pendidikan guru untuk mencetak kader-kader yang mendalami ilmu pengetahuan agama. Namun, dengan masuknya Amir Husin al-Mujahid ke dalam PUSA, organisasi ini segera mengalami perubahan yang mendasar.

Semula PUSA merupakan organisasi yang moderat, namun karena pengaruh Amir Husin, segera berubah menjadi organisasi yang radikal. Bila pada awalnya PUSA tidak anti Belanda, kemudian segera berubah menjadi anti Belanda dan dengan secepatnya mereka ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Hal ini disebabkan karena semakin meluasnya hegemoni Jepang di Asia Tenggara. Demikian juga, bila pada awalnya PUSA tidak anti *uleebalang*, yang dapat dilihat dari para pendiri, pengurus, maupun penasehatnya terdapat di antaranya yang berasal dari golongan *uleebalang*, namun kemudian PUSA berubah menjadi anti *uleebalang*. Perubahan sikap ini disebabkan antara lain oleh sikap sebagian besar *uleebalang* yang sewenang-wenang dan menindas rakyat dengan mengandalkan kekuasaan dan harta mereka. Selain itu PUSA menganggap sebagian *uleebalang* sebagai kaki tangan Belanda yang selalu bekerja sama dengan penjajah untuk menindas rakyat.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 767-768.

Kongres PUSA yang pertama diadakan di kota Asam, Sigli, pada bulan April 1940. Pada kongres ini terbentuklah Pemuda-PUSA. Namun, Pemuda PUSA segera mulai menyimpang dari tujuan PUSA yaitu pendidikan dalam arti yang sempit, dan semakin lama semakin berorientasi pada politik.<sup>39</sup>

## B. Kondisi Ekonomi

Pada awal abad ke-20, pemerintahan Hindia Belanda untuk kesekian kalinya merubah kebijakannya dalam mengamankan Aceh, karena hingga saat itu mereka belum berhasil menaklukkan Aceh. Untuk itu mereka mencoba melaksanakan suatu kebijaksanaan baru yang disebut politik Pasifikasi, yaitu suatu politik yang menunjukkan sikap damai melalui berbagai usaha yang mengacu ke arah itu.

Dalam rangka politik pasifikasi ini, pemerintah Hindia Belanda melakukan berbagai usaha, di antaranya dengan jalan meningkatkan kecerdasan rakyat, terutama anak-anak *uleebalang* dengan memberikan pendidikan Barat, memperbaiki kesehatan rakyat dengan sistem pengobatan modern, pembuatan jalan raya, jalan kereta api, dan pelabuhan-pelabuhan. Paling menonjol adalah memajukan perkembangan ekonomi daerah dan ekonomi rakyat, baik melalui eksplorasi maupun dengan membangun berbagai prasarana yang menyangkut kepentingan rakyat.<sup>40</sup> Pemerintah Hindia Belanda beranggapan jika ekonomi daerah dan ekonomi rakyat maju, maka penghidupan rakyat akan menjadi lebih

<sup>39</sup> Shiraishi, "Pemerintahan Militer", hlm. 42.

<sup>40</sup> Rusdi Sufi, *Pasifikasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Aceh* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985), hlm. 1-2.



baik dan lebih makmur, sehingga ketentraman dan ketertiban daerah akan lebih terjamin.

Tanggapan masyarakat Aceh terhadap kebijakan-kebijakan yang dijalankan pemerintah Hindia Belanda tersebut, pada awalnya berbeda-beda. Pemimpin adat (*uleebalang*) ada yang menuruti kehendak Belanda, di samping itu ada yang masih terus melakukan perlawanan. Pemimpin agama (ulama) ada yang berdiam diri saja, ada pula yang mengikuti *uleebalang* bekerja pada pemerintah Belanda dan ada juga yang terus mengangkat senjata. Demikian pula dengan kelompok rakyat, ada yang mengikuti ajakan pemerintah ada pula yang terus mengadakan perlawanan bersama pimpinan-pimpinan mereka yang masih tetap melanjutkan perlawanan.<sup>41</sup>

Awalnya perbaikan ekonomi sebenarnya sudah mulai dirintis pada masa pemerintahan Gubernur Sipil dan Militer Van Heutsz (1893-1904). Intensifikasinya baru dijalankan di bawah pemerintahan H. N. A Swart (1908-1918). Swart, dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dilakukannya berhasil meletakkan dasar bagi perkembangan dan kemajuan ekonomi di Aceh. Ia berusaha untuk mendekati rakyat dengan memperhatikan sikap damai dan bijaksana.<sup>42</sup>

Pemerintah Hindia Belanda di Aceh melakukan beberapa usaha untuk perbaikan ekonomi rakyat dan ekonomi daerah dengan melakukan pembangunan dalam bidang pertanian, perhubungan, dan pertambangan. Perhatian pemerintah untuk meningkatkan ekonomi mulai tampak pada tahun 1901, ketika Van Heutsz

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

meminta kepada dinas topografi untuk membuat sebuah peta ikhtisar Aceh dan daerah taklukannya. Perkebunan-perkebunan swasta atau pemerintah dan pertambangan-pertambangan mulai dibuka dan yang sudah ada perusahaannya lebih ditingkatkan. Prasarana-prasarana ekonomi seperti jalan, jembatan-jembatan, dan pelabuhan-pelabuhan baru mulai dibangun. Khusus di bidang pertanian rakyat diusahakan peningkatan hasil produksi.<sup>43</sup>

Usaha pemerintah untuk meningkatkan hasil produksi pertanian antara lain dengan memberikan bantuan modal kepada rakyat dan *uleebalang* yang tidak lagi melawan Belanda. Dalam hubungan ini pemerintah mendirikan bank seperti di wilayah Aceh Besar yang diberi nama *de Groot Atjehsche Afdeelingbank*. Selain itu dengan mendatangkan petani-petani dari pulau Jawa untuk memperkenalkan cara-cara bertani seperti di Jawa. Pemerintah juga memperkenalkan varietas bibit yang lebih baik yang cocok untuk daerah Aceh, membangun irigasi-irigasi modern, serta membentuk sebuah badan yang bertugas memberikan penerangan dan penyuluhan di bidang pertanian. Badan ini disebut *landbouw voorlichtingsciensst* (dinas penyuluhan pertanian).<sup>44</sup>

Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda untuk memperbaharui dan meningkatkan sistem pertanian rakyat, dalam perkembangannya cukup berhasil. Jika dalam tahun 1938 dan tahun-tahun sebelumnya, produksi beras daerah Aceh hanya mampu mencukupi kebutuhan diri sendiri, maka pada tahun 1939 terdapat kelebihan ekspor sebanyak 5.600 ton beras. Pada tahun 1940 dan 1941, kelebihan ekspor itu masing-masing mencapai

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 5-6.

24.000 ton dan 36.000 ton. Pada tahun 1942 (pada saat kedatangan Jepang) ekspor beras Aceh telah mencapai 45.000 ton.<sup>45</sup>

Di samping pertanian yang merupakan sumber penghasilan rakyat yang utama, dijalankan pula usaha perkebunan rakyat. Pemerintah menganjurkan kepada rakyat agar mengusahakan kembali pohon-pohon kelapa, pinang, dan lada. Pada tahun 1934, Aceh Utara telah mengekspor pinang sebesar 25.000 ton pinang dengan harga jual F 5 per 100 kg.<sup>46</sup> Sementara itu, di daerah Aceh Timur telah berkembang perkaretan rakyat, yang pada tahun 1939, mengekspor hasilnya sebesar 1,3 juta kg dengan harga jual F 29,28 per 100 kg.<sup>47</sup>

Penanaman kelapa juga mendapat perhatian pemerintah. Keseluruhan areal perkebunan kelapa di daerah Aceh meliputi 1.000 Ha. Kelapa setelah dijadikan kopra kebanyakan diekspor ke Penang (Semenanjung Tanah Melayu) dan Eropa. Dalam tahun 1939 ekspor kopra Aceh mencapai 12.150 ton dengan harga jual F 3.50 per 100 kg.<sup>48</sup> Perkembangan yang sama juga dialami di Aceh Barat untuk produksi minyak nilam. Dari daerah ini telah diekspor sebesar 115 ton dengan harga jual F 590 per 100 kg.<sup>49</sup>

Pada akhir tahun 1939 di seluruh Aceh terdapat 133 buah usaha perkebunan budidaya, dengan luasnya kurang dari 2.000 Ha dan 17 buah dengan luas 2.000 Ha atau lebih. Luas areal tanah yang ditanami menurut jenisnya, karet

---

<sup>45</sup> Al-Chaidar, *Aceh Bersimbah*, hlm. 8.

<sup>46</sup> Rusdi Sufi, *Pasifikasi*, hlm. 8.

<sup>47</sup> Ibrahim, dkk., *Sejarah Daerah*, hlm. 167-168.

<sup>48</sup> Rusdi Sufi, *Pasifikasi*, hlm. 9.

<sup>49</sup> Ibrahim, dkk., *Sejarah Daerah*, hlm. 168.

34.000 Ha, kelapa sawit 11.325 Ha, kopi 2.745 Ha, teh 850 Ha, sisal 1.620 Ha. Jumlah areal pohon tusam di Takengon adalah 70.000 Ha.<sup>50</sup>

Keadaan ekonomi dan politik di daerah Aceh menjelang berakhirnya kekuasaan Belanda menjadi bertambah baik. Keamanan daerah semakin lebih mantap, rakyat mulai percaya terhadap pemerintah Hindia Belanda. Kehidupan ekonomi yang sebelumnya mengalami kemunduran akibat perang dengan Belanda, juga menjadi semakin meningkat, terutama jika dilihat dari segi hasil-hasil produksi dan ekspor beberapa jenis hasil pertanian. Daerah Aceh pada waktu itu telah sejajar dengan daerah-daerah lain dalam wilayah Hindia Belanda. Rakyat Aceh mulai mengenal sistem pertanian baru dan daerah Aceh makin terbuka bagi pendatang-pendatang dari luar.<sup>51</sup>

### C. Kondisi Kebudayaan

Berbicara tentang kebudayaan tidak terlepas dengan manusia dan lingkungan di mana insan itu berinteraksi dengan lingkungannya. Kebudayaan lahir akibat kreatifitas manusia. Kreatifitas manusia muncul karena interaksi sesama manusia itu sendiri. Lahir dan berkembangnya kebudayaan di masyarakat sangat ditentukan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat tertentu. Kebudayaan hidup dan berkembang berkat adanya interaksi dengan dunia luar.

Demikian juga dengan kebudayaan Aceh yang merupakan hasil integrasi dari kebudayaan Cina, India, dan Timur Tengah atau Islam. Kebudayaan Aceh yang hidup dan berkembang sudah bercorak Islam atau dibingkai dengan nuansa

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 168.

<sup>51</sup> Rusdi Sufi, *Pasifikasi*, hlm. 16-17.



Islam. Boleh dikatakan tidaklah mudah membedakan antara kebudayaan Aceh dengan kebudayaan Islam yang diserapnya. Segala tindakan, tingkah laku, dan pandangan hidup masyarakat selalu berpijak atau berorientasi pada ajaran Islam termasuk nilai-nilai, norma-norma, dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat.<sup>52</sup>

Kebudayaan Aceh mengalami kemajuan dan mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Pada masa ini kepercayaan lama berupa animisme dan dinamisme tidak begitu berkembang karena Islam satu-satunya agama yang hidup dan diterima di kalangan rakyat.

Periode awal abad ke-20, sebagian masyarakat Aceh telah berkenalan dengan salah satu unsur kebudayaan Barat, yaitu pendidikan modern yang dipaksakan dari luar. Akibat kontak kebudayaan ini timbullah perubahan-perubahan dalam struktur masyarakat Aceh. Golongan elit adat lebih dahulu terpengaruh oleh kehidupan orang-orang Barat daripada golongan-golongan lain. Kontak sehari-hari dengan orang Barat, pembicaraan-pembicaraan, dan adat orang-orang Barat, merupakan media datangnya nilai-nilai baru pada golongan elit adat. Mereka adalah lapisan atas masyarakat Aceh yang telah mulai membebaskan diri dari sebagian nilai-nilai tradisional dan mengambil langkah yang menentukan untuk menerima pendidikan Barat.

Dalam golongan elit agama terdapat dua golongan, yaitu golongan yang fanatik dan golongan yang luwes. Golongan yang pertama pada awalnya tidak luwes dan kaku dalam menghadapi pendidikan Barat, karena mereka tidak dapat

---

<sup>52</sup> Soemargono dkk., *Profil Propinsi Republik Indonesia: Daerah Istimewa Aceh* (Jakarta: Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, 1992), hlm. 110.

meramalkan hasil-hasilnya. Mereka menganggap lembaga-lembaga pendidikan agama yang tradisional (pesantren) yang mereka punyai telah sempurna, karena itu mereka menolak pendidikan baru. Adapun golongan yang luwes sudah mengikuti langkah sebagian golongan elit adat, dengan memasukkan anak-anaknya pada sekolah-sekolah yang didirikan Belanda.<sup>53</sup>

Untuk menaikkan martabat mereka, pihak elit agama akhirnya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan mengambil bagian dalam sekolah-sekolah modern. Mereka akhirnya mengadakan penyesuaian diri dengan mendirikan sekolah-sekolah agama modern.

Dalam bidang kesenian yang merupakan kreasi rakyat Aceh makin lama menjadi mundur. Ini erat hubungannya dengan tidak adanya waktu luang. Di samping itu adanya larangan para ulama bahwa dalam masa perang dilarang mengadakan pertemuan-pertemuan yang tidak bertalian dengan agama. Demikian pula dalam bidang kesusasteraan yang mengalami masa surut. Hasil kesusasteraan yang penting dalam masa perang hanyalah *Hikayat Prang Sabi*.<sup>54</sup>

#### D. Kondisi Pendidikan

Sejalan dengan pengikut sertaan lembaga-lembaga pemerintahan adat dalam struktur birokrasi yang modern, diperlukan *uleebalang* yang berpendidikan modern. Rakyat pun perlu ditingkatkan kecerdasannya melalui sekolah desa untuk dapat menulis, membaca huruf latin, dan berhitung. Sejak tahun 1901 sudah ada beberapa putra *uleebalang* yang dikirim untuk bersekolah di Kutaraja. Tahun

<sup>53</sup> Alfian, *Wajah Aceh*, hlm. 198-199.

<sup>54</sup> T. Syamsuddin, *Pasang Surut*, hlm. 132-133.

1904 mereka mulai dikirim ke *Kweekschool* (sekolah guru) di Fort de Kock (Bukit Tinggi), ada yang dipilih untuk meneruskan ke *Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA, Sekolah Pamong Praja Bumi Putera) di Bandung dan Serang, dan ke *Middel Opleiding voor Indische Ambtenaren* (MOSVIA) di Madiun.<sup>55</sup> Namun, terdapat diskriminasi dalam penerimaan murid-murid sekolah. Pada umumnya kesempatan diberikan kepada anak-anak elit adat untuk memasuki sekolah berbahasa Belanda dan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi.

Dibandingkan dengan Jawa, Tapanuli, Minangkabau, dan beberapa daerah lainnya di Nusantara ini, Aceh termasuk daerah yang terlambat menerima sistem pendidikan dan perkembangannya pun sangat lambat. Menjelang Perang Dunia kedua di seluruh Aceh hanya terdapat 8 buah *Holland Inlandsche School* (HIS) yang didirikan oleh pemerintah kolonial. Dua di Banda Aceh, sedangkan yang lain-lain, di Sigli, Lhok Seumawe, Langsa, Meulaboh, dan Tapaktuan. Untuk anak-anak Belanda terdapat empat buah *Europesche Lagere School* (ELS), untuk anak-anak kaum Cina terdapat sebuah *Hollandsch-Chinese School* (HCS), dan untuk anak-anak Ambon terdapat sebuah *Hollandsch Ambonsche School* (HAS). Setingkat lebih tinggi dari itu ialah MULO, Sekolah Menengah Pertama, yang hanya ada satu di Aceh, yaitu di Banda Aceh.<sup>56</sup>

Pada tahun 1907 Gubernur Sipil dan Militer Van Daalen memprakarsai berdirinya sekolah-sekolah desa di Aceh. Sekolah untuk anak-anak perempuan didirikan pertama kali di Ulee Lheue pada tanggal 1 Mei 1910, yang kedua dibuka

<sup>55</sup> Alfian, *Wajah Aceh*, hlm. 194.

<sup>56</sup> Alfian, "Cendekiawan dan Ulama dalam Masyarakat Aceh: Sebuah Pengamatan Permulaan" dalam Alfian (ed.), *Segi-Segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh* (Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial (YIIS), 1977), hlm. 212.

di Lam Rueng tanggal 9 Oktober 1913, dan yang ketiga di Kutaraja pada tanggal 1 Desember 1913.<sup>57</sup>

Pertumbuhan kelompok kaum terpelajar yang mendapat pengetahuan umum di bangku sekolah agak sedikit ditolong oleh sekolah-sekolah yang didirikan Muhammadiyah dan Taman Siswa, masing-masing dipelopori oleh Zainal Baharuddin dan Sutikno. Menjelang Perang Dunia II, Muhammadiyah mempunyai 6 buah HIS di seluruh Aceh, sedangkan Taman Siswa mempunyai 4 buah sekolah yang sejajar dengan itu.<sup>58</sup>

Dengan demikian sekolah-sekolah yang didirikan di Aceh, sebagian besar merupakan hasil pekerjaan pemerintah kolonial dan usaha pergerakan-pergerakan nasional yang berasal dari luar. Pemuka-pemuka masyarakat Aceh, terutama kaum ulama, boleh dikatakan tidak menunjukkan inisiatif untuk mendirikan sekolah-sekolah seperti itu.

Pada tahun 1923 kegiatan elit agama Aceh dalam mendirikan sekolah agama baru dimulai dan diawali dari kerabat Sultan Tuwanku (Twk.) Raja Keumala dan Twk. Abdul Azis, yang membangun madrasah *al-Khairiyah* dengan mengambil tempat di Masjid Raya Baiturrahman Kutaraja. Kegiatan seperti ini di susul oleh Tgk. Abdul Wahab Seulimeum (1898-1966), tamatan *Dayah Jeureula*, yang pada tahun 1926 mendirikan Madrasah Najdilah, yang kemudian berubah menjadi Perguruan Islam, di Keunalui, Seulimeum.<sup>59</sup> Pada tanggal 24 November 1929 berdirilah sebuah Perkumpulan yang bernama "*Al-muslim*" di kantor Matang Glumpang Dua. *Al-muslim* bukanlah perguruan atau madrasah, melainkan

---

<sup>57</sup> Alfian, *Wajah Aceh*, hlm. 195.

<sup>58</sup> Alfian, *Cendekiawan dan Ulama*, hlm. 213.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 200-201.



perserikatan atau perkumpulan yang berdasarkan Islam. Setelah beberapa bulan berjalan atas anjuran Haji Cik didirikan sebuah perguruan atau madrasah yang berdasarkan keislaman untuk anak-anak anggota *Al-muslim*. Pada tanggal 13 April 1930 berdirilah sebuah sekolah di muka mesjid Matang Glumpang Dua yang bernama "*Madrasahsatu Al-muslim*" yang didirikan oleh Tgk. Abdurrahman Meunasah Meuncap.<sup>60</sup>

Pada tahun 1930 Tgk. Syaikh Ibrahim Lam Nga bersama T. Main, *uleebalang* Montasiek, mendirikan *Jamirah Diniyah al-Montasiah*, disingkat Jadam di Montasiek, dengan H. Muhammad Arief sebagai pimpinan madrasah.<sup>61</sup> Di daerah Pidie pelopor sekolah agama adalah Tgk. M. Daud Beureueh dengan dibantu oleh Tgk. Abdul Ujung Rimba, yang mendirikan *Jam'iyat Ad-Diniyyah* di Peukan Pidie, Sigli, pada tahun 1923.<sup>62</sup> *Jam'iyat Ad-Diniyyah* pada awalnya adalah suatu perkumpulan keagamaan yang mempunyai cabang di seluruh Aceh. Baru kemudian membangun perguruan yang terkenal dengan "*Madrasah Jam'iyat Ad-Diniyyah*" Blang Paseh, Sigli.<sup>63</sup> Dua tahun kemudian dengan bantuan *uleebalang* Mukim III Pineueng, T. Bentara H. Ibrahim, didirikan pula *Madrasah as-Sa'adah al-Abadiyyah* di Blang Paseh, Sigli.

Muhammadiyah mendirikan sekolah *Leergang* Muhammadiyah di Kutaraja pada tahun 1936, untuk perguruan Islam tingkat menengah sebagai kelanjutan madrasah ibtidaiyah. Sekolah ini dipimpin Tgk. Ismail Yakub, yang dua tahun kemudian diubah namanya menjadi *Darul Muallimin* dengan pimpinan

<sup>60</sup> Ismail Yakub, "Gambaran Pendidikan di Aceh Sesudah Perang Aceh-Belanda Sampai Sekarang" dalam Ismail Sunny (ed.), *Bunga Rampai*, hlm. 338.

<sup>61</sup> Alfian, *Wajah Aceh*, hlm. 201.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 201.

<sup>63</sup> Yakub, "Gambaran Pendidikan", hlm. 341.

Tgk. M. Hasbi Ash Shiddieqy. Pada tahun 1940 atas prakarsa T.M. Daud Panglima Polim didirikanlah *Mahad Imanil Mukhlis* (MIM) yang bertempat di Lampaku dengan dipimpin oleh Ilyas M. Ali, seorang pendatang dari Minangkabau. Pada tanggal 27 Desember 1939 Perguruan Normal Islam didirikan di Bireuen di bawah pimpinan Tgk. M. Nur el-Ibrahimy.<sup>64</sup>

Munculnya sekolah-sekolah agama baru memungkinkan kaum ulama di Aceh untuk tetap mempunyai peranan dominan dalam masyarakat, baik sebagai pemuka agama, cendekiawan, ataupun pimpinan masyarakat.

#### **E. Kondisi Agama**

Masuknya Islam ke Aceh pada abad ke-7 atau ke-8 Masehi, telah banyak mempengaruhi adat istiadat Aceh. Pengaruh Islam yang sangat besar ini dapat dilihat dari sebuah pepatah yang berbunyi: *Hukom ngo Adat lagee Zat ngo Sipheuet* (Hukum dengan adat seperti benda dengan sifatnya, tidak terpisahkan). Hukum yang dimaksud ialah hukum Islam yang diajarkan oleh para ulama.<sup>65</sup> Ini ditunjukkan oleh pepatah lain yang berbunyi: *Adat bak Poteu Meureuhom, Hukom bak Syiah Kuala* (kekuasaan adat pada sultan, ketentuan hukum (keagamaan) pada Syekh Kuala).<sup>66</sup> *Poteu Meureuhom* yang dimaksud ialah almarhum Sultan Iskandar Muda.

Sebagai hasil usaha para ulama dan muballig sejak awal masuknya Islam di Aceh, rakyat Aceh sangat fanatik menganut agama Islam. Fanatik di sini berbeda dengan taat. Seseorang yang fanatik belum tentu taat, namun kalau

<sup>64</sup> Alfian, *Wajah Aceh*, hlm. 202.

<sup>65</sup> Ismuha, *Ulama Aceh*, hlm. 6.

<sup>66</sup> Taufik Abdullah (ed.), *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta: LP3S, 1987), hlm. 168.

dikatakan mereka tidak Islam, mereka marah dan matipun mereka mau. Selaiipun belum tentu mereka semua patuh dalam melaksanakan perintah-perintah agama, seperti shalat dan puasa.

Ajaran Islam secara garis besar dapat dibagi dua. Pertama mengenai Aqidah (kepercayaan) dan yang kedua mengenai Fiqih (hukum). Mengenai fiqih, di Aceh pada awalnya tidak ada perbedaan, semua ulama menganut Mazhab Syafi'ie. Mengenai Aqidah terdapat dua aliran di Aceh. Pertama aliran *wahdatu al wujud* yang dipelopori oleh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrany. Pada masa Sultan Iskandar Muda, aliran *wahdatu al wujud* banyak dianut, karena ulama yang mendampingi beliau adalah Syamsuddin As-Sumatrany. Baru pada masa Sultan Iskandar Tsani aliran *ahlus sunnah wa al-Jama'ah* menjadi aliran yang dianut oleh pemerintah, karena ulama yang mendampingi adalah Nurrudin Ar-Raniry yang merupakan tokoh pembaharuan di Aceh.<sup>67</sup>

Nurrudin Ar-Raniri mulai melancarkan pembaharuan di Aceh setelah mendapat pijakan dan dukungan yang kuat di istana Aceh. Pembaharuan utamanya adalah memberantas aliran *wahdatu al wujud* yang dianggapnya sebagai aliran sesat. Menurutny, pendapat Hamzah Fansuri tentang *wahdatu al wujud* dapat membawa kepada kekafiran<sup>68</sup>

Sesudah Muhammadiyah masuk di Aceh, mengenai fiqih pun mulai ada perbedaan aliran. Artinya mulai ada yang menganut pendapat yang lain dari Mazhab Syafi'ie, karena memang Muhammadiyah tidak mengikatkan diri kepada sesuatu mazhab tertentu, setiap masalah diperiksa dalil-dalilnya. Dalil yang

<sup>67</sup> Taufik Abdullah (ed.), *Agama dan Perubahan*, hlm. 33.

<sup>68</sup> Rohison Anwar dan Mukhtar Solihin, *Ilmu Tasawuf* (Bandung: Pustaka Setia, 200), hlm. 177-179.

dianggap kuat, itulah yang diambil. Untuk ini Muhammadiyah membentuk suatu majelis khusus yang dinamakan *Majlis Tarjih*. Tetapi, karena tokoh-tokoh Muhammadiyah di Aceh, bukan para ulama, maka aliran itu mula-mula tidak mendapat perhatian. Masyarakat Aceh tidak menaruh kepercayaan terhadap hukum Islam yang disampaikan oleh bukan para ulama, lebih-lebih lagi hukum yang disampaikan itu banyak berbeda dengan hukum yang mereka dengar dari para ulama yang mereka percayai.<sup>69</sup>

Dalam perjuangan nasional, Aceh terkenal karena perangnya melawan Belanda. Perang Aceh (1873) memang berat bagi Belanda, sehingga Belanda perlu menggunakan sarjana di samping tentara dan senjata. Sarjana yang digunakan oleh Pemerintah Hindia Belanda ialah Dr. C. Snouck Hurgronje, yang pada tahun 1891 tiba di Aceh.

Snouck melihat bahwa dalam arena politik Aceh, sultan dan bangsawannya, *uleebalang* (kepala daerah merangkap panglima perang), dan ulama mempunyai peran penting. Pada waktu perang Aceh berkecamuk, mereka memimpin rakyat berurutan. Mula-mula sultan dengan para bangsawan, setelah sultan lemah dan tidak diharapkan, tampilah *uleebalang-uleebalang*. Tetapi mereka tidak mampu mempersatukan rakyat dan menjadi malas, maka kesempatan untuk memimpin jatuh ke tangan ulama yang hidup di tengah-tengah rakyat.<sup>70</sup> Melalui penyebaran ideologi *Prang Sabi* (Perang Sabil), ulama mengajak rakyat meningkatkan kekuatan mereka untuk berperang melawan musuh yang sangat berbahaya, bukan hanya demi keselamatan negara tapi juga demi eksistensi

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

<sup>70</sup> P.J. Suwarno, *Ulama di Masyarakat Aceh* (Yogyakarta : IKIP Sanata Dharma, 1976), hlm. 20.



agama. Ulama menggunakan kekuatan dengan menjadikan perang itu sebagai salah satu aspek ibadah yang dianjurkan Islam yaitu jihad di jalan Allah dengan perang suci.

Hikayat Perang Sabil mendorong rakyat Aceh untuk berperang melawan Belanda. Hikayat Perang Sabil menjadi motor utama bagi Bergeraknya perlawanan rakyat Aceh terhadap kekuasaan Belanda. Hikayat tersebut dikarang oleh Tgk. Chik Haji Muhammad Pante Kulu. Hikayat ini disusun dalam bahasa Aceh bersajak. Isinya anjuran untuk berperang melawan kafir. Kalah atau menang, mati atau hidup dalam perang itu, semua mendapatkan pahala dari Tuhan. Kalau mati dalam perang Sabil dinamakan mati Syahid. Orang mati Syahid dalam perang tidak usah dimandikan dan tidak usah dikafankan dengan kain kafan yang baru, cukup dikafankan dengan yang ada di badannya saja.<sup>71</sup> Di antara bunyi syair itu ialah:

### PRANG SABIL

*Allah hai prang, prang sabilillah  
Mujahidin prang, prang sabilillah  
Menyo matei syahid dalam prang sabil  
Dudo Tuhan brie ainul mardiah*

Artinya: Sebutkan nama Allah menuju perang sabil  
Perang Mujahiddin adalah perang di jalan Allah  
Bila mati syahid di medan perang  
Kelak Allah berikan bidadari di surga

*Tajak lampurang bek kuyue bate  
Bab aneuk beudee keuneong bak dada  
Aneuk meureuyom keu bantai susoon  
Aneuk boom atom payong urou kha*

<sup>71</sup> Ismuha, *Ulama Aceh*, hlm. 47-49.

Artinya: Pergilah berperang tak usah gentar  
 Sekalipun anak pelor kena di dada  
 Anak meriam jadikan bantal susun  
 Anak bom atom jadikan payung di hari panas

*Jak kudo do kudoda idi  
 Banta saidi beureujang raya  
 Menyo rayeek baita saidi  
 Jak prang sabil lawan Beulanda*

Artinya: Marilah tidur anakku sayang  
 Cepatlah besar hai anakku  
 Bila besar hai putraku  
 Pergilah berperang melawan Belanda

*Jak kudo do kudoda idang  
 Bungeong keumang lam istana  
 Menyo rayeek banta seudang  
 Jak taganyang kaphe Beulanda*

Artinya: Marilah kuayun anakku sayang  
 Bunga mekar dalam istana  
 Bila kau sudah besar kelak  
 Pergilah ganyang kafir Belanda

Gubahan: Keucik Yusuf  
 Lhong, Aceh Besar<sup>72</sup>

Sebagai pengaruh dari Hikayat Perang Sabil itu, setiap putera Aceh yang mendengar bacaan hikayat itu, dengan sukarela mendaftarkan diri menjadi lasykar muslimin untuk mencari mati syahid. Sehubungan dengan hal tersebut, Snouck menasehati Pemerintah Hindia Belanda dengan segala cara untuk mencegah ulama memimpin rakyat dalam arena politik dan mengisolirnya ke dalam bidang keagamaan saja. Nasehat Snouck itu diterima oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk menguasai dan memerintah Aceh.

Akibatnya ulama tersingkir dari percaturan politik pemerintahan dan hanya menjadi pemimpin agama tanpa mengetahui ilmu pengetahuan lain kecuali

<sup>72</sup> Jakobi, *Aceh dalam Perang*, hlm. 253-254.

pengetahuan agama dari kitab. Akhirnya mereka menjadi ulama yang oleh orang Aceh sekarang disebut ulama-kitab, artinya ulama yang berpedoman pada kitab dan ajarannya tidak disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, sehingga menjadi sempit dan kolot. Merekalah yang mendidik anak-anak rakyat Aceh di *dayah* (pesantren) pada waktu itu.<sup>73</sup>

Akibat lain dari situasi perang ialah terbatasnya kesempatan untuk menyebarkan pengetahuan dan memperdalam ilmu keagamaan. Meskipun kekuatan panggilan keagamaan makin kuat dalam kehidupan pribadi dan kehidupan sosial, tetapi dimensi-dimensi dari kehidupan keagamaan tidaklah berfungsi secara seimbang. Muncullah ucapan yang selalu diulang-ulang, "Meskipun seorang Aceh alpa mengerjakan shalat, tetapi jika dikatakan *Kaphe* (kafir) ia akan mengambil rencongnya". Artinya meskipun dimensi perilaku dan pengetahuan dari kehidupan keagamaan itu relatif rendah, tetapi dimensi keprihatinan dan penghayatan sangatlah tinggi.<sup>74</sup>

Setelah empat puluh tahun berperang (1873-1912), elit agama (ulama) yang masih tinggal, pada umumnya sudah tidak mempunyai cukup potensi lagi untuk menghadapi persenjataan Belanda. Akibatnya elit agama terbagi dalam tiga kelompok:

1. Yang duduk sebagai *kadhi* (hakim agama) dalam pemerintahan *uleebalang* yang telah mengakui kedaulatan Belanda, dengan kata lain mereka sudah termasuk dalam struktur birokrasi pemerintahan kolonial Belanda. Pada golongan ini dapat pula dimasukkan elit agama tingkatan rendah yang

<sup>73</sup> P.J. Suwarno, *Ulama di Masyarakat Aceh*, hlm. 21.

<sup>74</sup> Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat*, hlm. 172.

bertugas menjalankan pekerjaan-pekerjaan keagamaan di desa-desa sebagai *Teungku Meunasah*;

2. Kelompok kedua, adalah mereka yang terus menarik diri dari gerakan perlawanan terhadap Belanda, tetapi tidak turut dalam struktur pemerintahan adat yang telah mengakui kedaulatan Belanda. Mereka hanya semata-mata memberikan pengajian agama dalam *dayah*;
3. Kelompok ketiga, adalah golongan yang masih terus melawan Belanda. Yang termasuk golongan ini ialah *teungku-teungku* yang terus menerus membakar semangat rakyat yang dapat dipengaruhinya dan masih mau mendengar mereka untuk terus mengadakan perlawanan terhadap Belanda.<sup>75</sup>

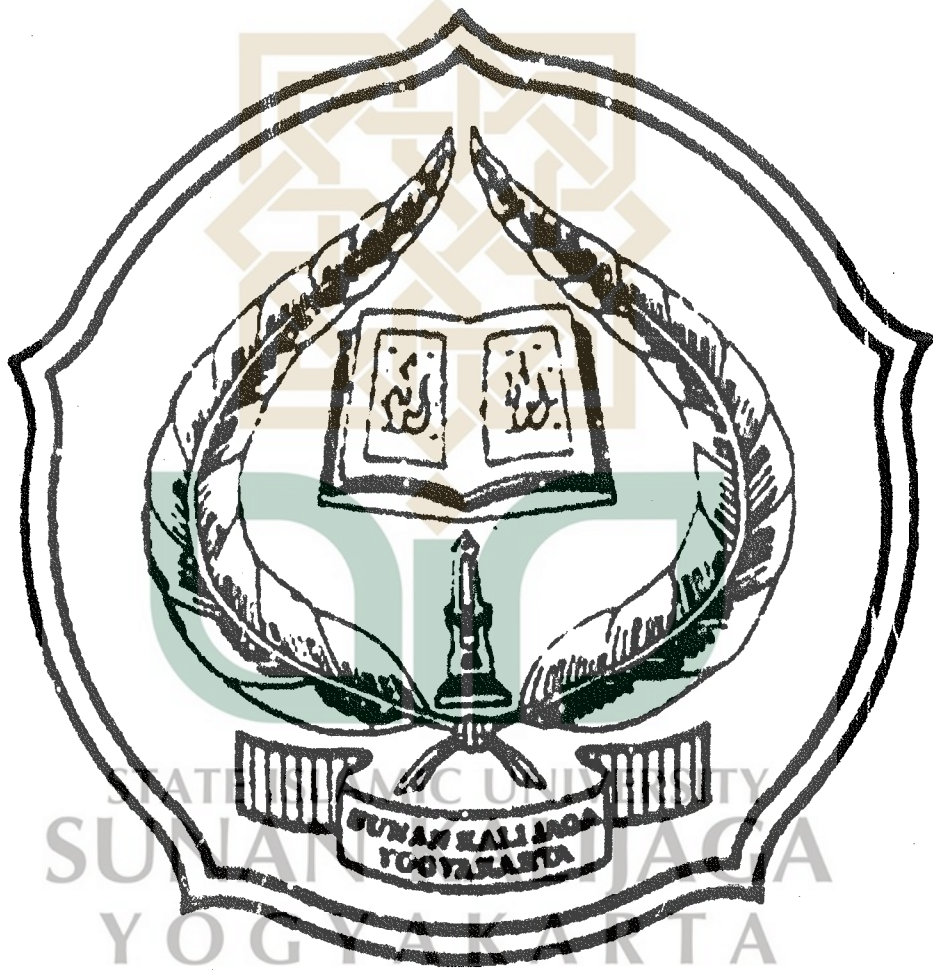


STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>75</sup> Alfian, *Wajah Aceh*, hlm. 192-193.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

### BAB III

## PENDUDUKAN JEPANG DI ACEH

### A. Kedatangan Jepang ke Aceh

Sebelum Jepang menaklukkan pemerintahan kolonial Belanda pada tanggal 8 maret 1942 dengan tanpa syarat, Jepang terus-menerus mengadakan propagandanya yang luas terhadap Indonesia. Radio Tokyo terus-menerus mempropagandakan cita-cita kemakmuran bersama Asia Timur Raya yang dimulai dan ditutup dengan lagu Indonesia Raya. Selama agresi dilancarkan, siaran itu diintensifkan, dan sebelum pendaratan dilakukan, dari udara disebarkan bendera Jepang dan Indonesia, yaitu Hinomaru dan Merah Putih, disertai tulisan dibelakangnya yaitu satu warna satu bangsa. Kesemuanya dimaksudkan untuk menarik hati rakyat dan bangsa Indonesia yang kerinduannya akan kemerdekaan tidak pernah padam.<sup>76</sup>

Tiga minggu sebelum Jepang mendarat, rakyat Aceh sudah mulai memberontak terhadap Belanda. Pada tanggal 19-20 Ferbuari 1942 telah dilakukan sabotase terhadap kawat-kawat telepon dari Banda Aceh ke Seulimeum. Tanggal 24 Februari 1942 rakyat membunuh Tiggelman, Kontrolir Seulimeum. Begitu pula dengan Graaf U Berndtoff van Sperling yang mati terbunuh ketika sedang memeriksa sabotase jalan kereta api.<sup>77</sup> Pada tanggal 7 Maret 1942 malam

---

<sup>76</sup> Mohamad Sidky Daeng Materu, *Sejarah Pergerakan Nasional Bangsa Indonesia* (Jakarta : Gunung Agung, 1985), hlm. 119.

<sup>77</sup> Nasution, *Sekitar Perang*, hlm. 94.

hari, jalan penghubung Kotaraja-Medan dirusak, demikian pula dengan hubungan telepon Kutaraja-Aceh Barat-Kroeeng Raya.<sup>78</sup>

Sebelum Jepang melakukan pendaratan, Aceh telah melakukan perlawanan terhadap Belanda dan mengejar tentara Belanda sampai ke pedalaman Aceh dan Sumatera Timur. Segala aktivitas rakyat Aceh sebelum Jepang mendarat, memudahkan bagi Jepang datang ke Aceh. Kekalahan Belanda di Sumatera Selatan (Palembang) tanggal 14 Februari dan 1 Maret di Jawa memberi kesan kuat pada rakyat Aceh dan menambah keyakinan mereka bahwa Belanda telah patah semangat dalam menghadapi negara besar seperti Jepang.

Pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi perlawanan di Calang. Rakyat telah memutuskan perhubungan dengan Banda Aceh dan Meulaboh. Rakyat menyerbu ke dalam tangsi *Koninklijk Nederlandsch Indische Leger* (KNIL) dan kantor pemerintahan. Pertempuran-pertempuran berlangsung sampai pagi. Bala bantuan KNIL didatangkan dari Meulaboh di bawah pimpinan Kapten Klop Rogge. Tanggal 11 Maret 1942 Belanda meninggalkan Calang. Sepanjang pantai barat banyak terjadi perlawanan rakyat. Guna memenuhi kebutuhan mereka beserta keluarganya pihak Belanda merampas bahan makanan rakyat yang berdiam di sepanjang jalan yang mereka lalui.<sup>79</sup>

Jepang sama sekali tidak menemukan perlawanan dari pihak tentara Belanda ketika angkatan lautnya pada tanggal 12 dan 13 Maret 1942 mendarat di empat tempat, yaitu : Sabang, Ujung Batee (Aceh Besar), Kuala Bugak (Aceh Timur), dan Tanjung Tiram. Tentara Jepang yang mendarat di Ujung Batee maju

---

<sup>78</sup> S. M. Amin, "Sejenak Meninjau Aceh, Serambi Mekkah" dalam Ismail Sunny (ed.), *Bunga Rampai*, hlm. 65.

<sup>79</sup> Nasution, *Sekitar Perang*, hlm. 96-97.

ke arah timur, sehingga bertemu dengan Tentara Jepang yang mendarat di Kuala Bugak, sedangkan yang mendarat di Kuala Bugak maju ke Sumatera Timur, bertemu dengan Tentara Jepang yang mendarat di Tanjung Tiram (Sumatera Timur).<sup>80</sup>

Sebelum datang ke Aceh, pihak Jepang telah terlebih dahulu membina hubungan dengan sejumlah pemuka Aceh, yaitu melalui kegiatan mata-mata atau kolone ke-5 yang dipimpin oleh Mayor Fujiwara kegiatan tersebut kemudian terkenal dengan nama *Fujiwara Kikan* atau Barisan "F". Barisan F adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh Jepang untuk mengadakan siaran dan propaganda-propaganda tentang maksud dan tujuannya masuk ke Aceh yang bertujuan untuk memberikan kemerdekaan.<sup>81</sup> Anggota inti dari *Fujiwara Kikan* ini terdiri dari lima orang perwira muda lulusan sekolah *Nakano*, suatu sekolah latihan untuk kegiatan intelijen. Sebagai tambahan, beberapa orang ahli telah diambil secara perseorangan untuk membantu *Fujiwara Kikan*, di antaranya adalah Masubuchi Sahei.<sup>82</sup> Pemimpin barisan F untuk Aceh adalah Said Abu Bakar dan Said Ali.

Setelah Jepang berhasil mendarat di Aceh, hubungan kerjasama antara rakyat Aceh dengan Jepang berlangsung baik. Hal ini sebagaimana digambarkan oleh Shazaburo Iino, bahwa rakyat Aceh telah bekerjasama dengan tentara Jepang untuk menghancurkan dan menghapuskan pengaruh Belanda, sehingga Belanda dapat dikalahkan dalam tempo dua pekan.<sup>83</sup> Rakyat Aceh menyebut pasukan Jepang yang memasuki wilayah Aceh dengan sebutan Pasukan F karena mereka selalu memakai kain putih bertulis huruf "F" selebar lima jari di lengan kiri.

---

<sup>80</sup> Ismail Yakub, *Gambaran Pendidikan*, hlm. 359.

<sup>81</sup> Ibrahim dkk., *Sejarah Daerah*, hlm. 204.

<sup>82</sup> Shiraishi, *Pemerintahan Militer*, hlm. 44.

<sup>83</sup> Ibrahim dkk., *Sejarah Daerah*, hlm. 177.



Setelah memasuki Aceh tanpa melalui perlawanan apa pun, mulailah direncanakan pembentukan Pemerintahan Sipil di Aceh. Dalam penyusunan sistem pemerintahan di Aceh, Jepang tidak banyak melakukan perubahan terhadap sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan zaman Belanda umumnya masih diteruskan, hanya saja nama-nama daerah diganti dengan istilah Jepang.<sup>84</sup>

Persiapan pemerintahan di Aceh diresmikan pada tanggal 21 April, sehari setelah peleburan *Fujiwara Kikan* di Singapura dan Organisasi F di Aceh. Masubuchi sebagai penasehat umum bertanggung jawab menjaga keamanan dan melakukan kegiatan propaganda. Berikut ini adalah sebagian dari perintah yang diberikan kepada staf Jepang yaitu: sistem pemerintahan Belanda akan dipakai sebanyak mungkin; tidak akan didirikan *Chian-iji-kai* (Komite Penjaga Keamanan); dianjurkan untuk memakai kembali bekas-bekas pegawai bumi putera; agama dan adat penduduk harus dihormati dan tidak dicampuri.<sup>85</sup>

Dalam pertemuan antara Masubuchi, Said Abu Bakar, Tgk. Muhammad Daud Beureueh, T. Muhammad Ali Panglima Polim, dan T. Nyak Arief, disusunlah pemerintahan sipil Jepang di Aceh. Mayor Jenderal Shazaburo Iino diangkat menjadi Kepala Pemerintahan Militer (Residen Aceh) yang dalam istilah Jepang disebut *Aceh Shu Chokan*. T. Nyak Arief diangkat menjadi wedana Kutaraja yang disebut *gun-cho*, dan T. Muhammad Ali Panglima Polim diangkat menjadi *gun-cho* untuk Seulimeum.

Dalam perkembangannya, T. Nyak Arief diangkat sebagai penasihat *shu chokan* dan menjadi ketua *Aceh shu sangi kai* (ketua DPRD), kemudian T. Nyak

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 177.

<sup>85</sup> Shiraishi, "Pemerintahan Militer", hlm. 46-47.

Arief diangkat menjadi wakil ketua Sumatera *chuo sangi in*, atau DPR untuk kawasan Sumatera yang berkedudukan di Bukit Tinggi. T. Muhammad Ali Panglima Polim diangkat menjadi *Kosai Kyokutjo* atau Kepala Kantor Urusan Kebahagiaan Umum.<sup>86</sup>

*Aceh shu chokan* (S. Iino) merupakan penguasa tunggal di daerah Aceh. Dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh badan lain yang langsung di bawah *Aceh shu Chokan*. Badan-badan itu antara lain:

- (1) *Aceh Syu Seico Somubuco* (Kepala Urusan Pemerintahan Umum), M. Yamamoto
- (2) *Aceh Syu Seico Sangyu Kotabuco* (Kepala Urusan Ekonomi dan Lalu lintas), S. Masubuti
- (3) *Aceh Su Seico Zaimubuco* (Kepala Urusan Keuangan), S. Yamaguti
- (4) *Aceh Seico Sendenmaco* (Kepala Urusan Sarana), S. Sagawa
- (5) *Aceh Syu Seico Sondonka Sinbunhanco* (Kepala Urusan Penerangan), T. Kodera
- (6) *Aceh Syu Seico Keimuboco* (Kepala Kepolisian), B. Ueki
- (7) *Aceh Syu Seico Sihobuco* (Kepala Kehakiman), Aoki.<sup>87</sup>

## **B. Kebijakan Jepang Terhadap Rakyat Aceh**

Dalam penyusunan sistem pemerintahan di Aceh, Jepang masih menggunakan sistem pemerintahan Belanda, hanya namanya diganti dengan istilah Jepang. Dalam sistem penjajahan Belanda, keresidenan Aceh dibagi atas empat bagian (*Afdeling*) yang dikepalai oleh seorang asisten residen, yaitu (1) *Afdeling Groot Atjeh* dengan ibukotanya Kutaraja. (2) *Afdeling Weskust van Atjeh*

<sup>86</sup> Jakobi, *Aceh Dalam Perang*, hlm. 92.

<sup>87</sup> Ibrahim dkk., *Sejarah Daerah*, hlm. 179.

dengan ibukotanya Meulaboh. (3) *Afdeling Noordkust van Atjeh* dengan ibukotanya Sigli, dan (4) *Afdeling Ooskkust van Atjeh* dengan ibukotannya Langsa.<sup>88</sup>

Dalam masa Jepang keresidenan diganti dengan nama *syu* dan kepalanya disebut *syu cogan afdeling*, dan sub keresidenan menjadi *bunshu* yang dipimpin oleh *bunshu-cho*. Untuk menggantikan asisten residen Belanda diangkatlah orang-orang Jepang sebagai *bunshu-cho* di setiap bagian. *Onder afdeling* diganti menjadi *gun* yang diperintah oleh *gun-cho*. Distrik atau *uleebalangschap* dinamakan dengan *sen* yang dikepalai oleh *son-cho*. Sebagian besar *uleebalang*, kecuali yang dianggap sangat pro-Belanda dan tidak dapat dipercaya, dikembalikan ke posisi mereka sebagai kepala daerah swapraja dan dinamakan *son-cho*. *Gampong* (kampung) dinamakan dengan *kumi* yang diperintah oleh *komicho*.<sup>89</sup>

Pembahasan pokok dalam menyusun politik pemerintahan untuk Sumatera berkisar masalah bagaimana menguasai dan menyalurkan kemampuan orang Aceh. Kebijakan yang diusulkan adalah mengorganisasi para pemuda yang aktif dan paling tinggi kesadaran politiknya ke dalam angkatan kepolisian yang ditempatkan di Malaya, yang ketentraman sosial dan politiknya sangat terganggu oleh orang-orang Cina yang anti Jepang. Usul tersebut dilaksanakan dalam bentuk organisasi *tokubetsu-keisatsu-tai* (kesatuan polisi khusus), yang bertugas melaksanakan kegiatan kontra intelijen di Aceh sendiri, bukan di Malaya.<sup>90</sup> Dalam menanankan pengaruhnya di Aceh, pemerintah militer Jepang menggunakan dua

<sup>88</sup> Ibrahim dkk., *Sejarah Daerah*, hlm. 178.

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 178-179.

<sup>90</sup> Shiraishi, *Pemerintahan Militer*, hlm. 49.

jalur kekuasaan yaitu jalur ulama yang memegang kekuasaan di bidang hukum dan jalur *uleebalang* yang memegang kekuasaan di bidang adat, karena Jepang berpendapat bahwa dua golongan tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Aceh

Pada permulaan bulan Januari 1943, setelah kurang lebih satu tahun menduduki Aceh, Jepang mulai melaksanakan politik yang lebih positif dalam masalah Islam. Seorang ulama terkemuka, keturunan sultan Aceh, yang bernama Twk. Abdul Azis diangkat menjadi Penasehat Pemerintah dalam Urusan Islam Untuk Seluruh Aceh.

Pemerintah juga telah membentuk sebuah badan resmi yang dapat memberikan nasehat-nasehat kepada pemerintah di bidang agama Islam. Badan ini bernama Majelis Agama Islam untuk Bantuan Kemakmuran Asia Timur Raya (MAIBKATRA), yang dalam bahasa Jepang disebut *Aceh-shu-kaikyo-kyoryoku kai* dengan ketuanya Twk. Abdul Azis, wakil-wakil ketua Tgk. Muhammad Daud Beureueh dan Tgk. Muhammad Hasjbi.<sup>91</sup>

Dalam pidato peresmian MAIBKATRA, tanggal 10 Maret 1943, Chokan Iino menjelaskan tujuan membentuk badan ini, bukan semata-mata usaha untuk menjalankan syariah Islam dengan sempurna, sebagaimana telah dijanjikan oleh Jepang sebelum mendarat, akan tetapi untuk membentuk organisasi resmi yang membantu dalam usaha mempertinggi kemakmuran Asia Timur Raya.<sup>92</sup> Selain itu disebutkan pula peran ulama yang utama ialah mengerahkan tenaganya untuk menyadarkan rakyat dalam beberapa hal; yang pertama kemurnian tujuan dari

---

<sup>91</sup> Amin, *Sejenak*, hlm. 66.

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 66.



peperangan untuk Asia Timur Raya; kedua perlunya secara gotong royong memikul beban dan kesenangan hidup negara yang kemudian dapat menjamin tercapainya kemenangan; ketiga, perbedaan keadaan hidup dalam zaman perang dan damai adalah lebih tidak menguntungkan dalam keadaan peperangan di negara manapun juga; keempat, perlu adanya penghematan; dan kelima, menasehatkan rakyat untuk tidak ikut campur tangan mengenai urusan pemerintah negara.<sup>93</sup>

Di bidang ekonomi pada masa Jepang tidak banyak berbeda dengan kehidupan sosial. Sebelumnya hal ini dapat dilihat sebagaimana yang telah digambarkan oleh S. Masubuti sebagai kepala urusan ekonomi dan lalu lintas pada *Aceh Syu*, seperti konsepsi dalam bidang pertanian, pengairan, kerajinan, peternakan, dan pertambangan. S. Masubuti menyebutkan telah dibuat rancangan untuk memenuhi cita-cita mengenai kemajuan dalam pengairan. Dengan adanya pengairan itu maka terhapuslah sawah tadah hujan. Supaya hasilnya memuaskan, tanah sawah diperluas dan ditanami bibit yang terpilih. Dalam melakukan usaha peningkatan produksi pertanian rakyat, Pemerintah Jepang melakukan usaha-usaha untuk membersihkan aliran air di sawah-sawah dengan sistem gotong royong.<sup>94</sup>

Dalam hal kerajinan, rakyat Aceh dianjurkan untuk memajukan pekerjaan memelihara ulat sutera dan bertanam kapas, dengan maksud agar rakyat dapat membuat pakaian dengan secukupnya. Dalam bidang peternakan sedang dicita-

---

<sup>93</sup> Ibrahim dkk., *Sejarah Daerah*, hlm. 193.

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 185.

citakan mengadakan satu latihan besar dari berbagai golongan pertanian (*Hozu Kurenzyo*) bagi pemuda Aceh.<sup>95</sup>

Untuk tujuan-tujuan perang, Jepang telah melaksanakan politik bumi hangus seluruh prasarana ekonomi, dengan alasan untuk memperlemah kemampuan politik lawan (Belanda) yang diduga masih mengambil keuntungan dari sisa-sisa perekonomian yang ditinggalkannya. Surplus beras daerah Aceh pada tahun 1941 yang telah mencapai 36.000 ton punah dengan sekejap mata. Kenyataan ini semakin diperparah oleh tindakan-tindakan Jepang yang mewajibkan penyeteroran beras, yang pada tahun 1943 mencapai angka 17.000 ton. Sebagai akibatnya banyak tanah rakyat yang disita Jepang karena tuntutan yang sangat berat tidak terpenuhi.<sup>96</sup>

Para pedagang bumi putera walaupun masih melakukan kegiatan-kegiatan di bidang perdagangan, namun tidak dapat mengembangkan usaha-usaha mereka. Mereka pada zaman ini meninggalkan usaha-usaha dagang, sebab kebutuhan rakyat di bidang sandang dan pangan diusahakan oleh pemerintah dan disalurkan kepada rakyat melalui Bagi Dan Kumpul (BDK) dalam istilah Jepang *Shu-hai-kai*.<sup>97</sup> Tugas dari BDK ini bukan saja sebagai penyalur, tetapi juga bertindak sebagai penampung. Dalam usaha melakukan penampungan hasil-hasil bumi dari rakyat terutama sumber makanan pokok seperti padi adalah dengan mengumpulkan dari petani-petani yang dilakukan oleh orang-orang yang ditunjuk untuk mengelola BDK tersebut.

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm. 183.

<sup>96</sup> Al-Chaidar, *Aceh Bersimbah*, hlm. 24.

<sup>97</sup> Shiraishi, "Pemerintahan Militer", hlm. 57.

Pada zaman ini pendidikan secara umum boleh dikatakan mengalami kemunduran, jika dibandingkan dengan keadaan pendidikan pada akhir penjajahan Belanda. Pada akhir penjajahan Belanda telah terdapat bermacam-macam jenis pendidikan, seperti pendidikan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah mulai dari *Volkschool* (sekolah dasar) yang terdapat di desa-desa sampai kepada MULO yang terdapat di Kutaraja (Banda Aceh). Selain sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, pada masa ini juga terdapat sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh swasta seperti Muhammadiyah, Taman Siswa, dan sekolah usaha masyarakat setempat misalnya Pusaka Peurelak, Rumah Perguruan Kita, dan Rumah Perguruan Murid di Takengon.

Sesudah Aceh berada di bawah pemerintahan militer Jepang keadaan pendidikan mengalami kemerosotan. Pada masa ini tidak dibenarkan sama sekali sekolah lanjutan yang diasuh oleh swasta. Hanya ada dua sekolah lanjutan negeri yaitu *Shu Gakko* (sekolah lanjutan lima tahun) dengan kepala sekolahnya orang Jepang yang bernama I. Hashimoto dan guru-gurunya orang Indonesia seperti Karim Duriat, Suratno, Ali Murtopo, Mukman, S. Burhanudin Pasaribu, Hasjim M. K., dan A. Azis Ibrahim. Kedua ialah *Sihang Gakko* (Sekolah Guru tiga tahun). Sekolah ini juga dipimpin oleh Jepang. Guru-gurunya antara lain Burhanuddin Harahap dan Ibrahim.<sup>98</sup>

Di bidang pendidikan dasar, semua sekolah dasar dari peninggalan Belanda dijadikan *Kokumin Gakko* (sekolah negara) yang pelajarannya enam tahun. Bahasa pengantar yang dipergunakan di sekolah dasar ini adalah bahasa Melayu dan bahasa Jepang. Dua bahasa asing yang selama ini dipelajari yaitu

---

<sup>98</sup> Ibrahim dkk., *Sejarah Daerah*, hlm. 187.

bahasa Belanda dan Inggris harus dihilangkan. Huruf Arab Melayu diganti dengan huruf-huruf Jepang *Katakana* dan *Hiragana*. Lagu-lagu Jepang seperti *Kimigayo* dan *Taiso* (Senam Pagi) diajarkan kepada setiap murid sekolah.<sup>99</sup>

Pendidikan pada masa ini dititik-beratkan dalam bidang kemiliteran, dan Jepang mengharapkan putra-putra Indonesia dapat membantunya dalam menghadapi perang. Untuk mengatur masalah pendidikan secara keseluruhan, pemerintah telah membentuk sebuah badan atau kantor pendidikan yang bernama *Bunkyo* yang berfungsi mengatur sistem pengajaran di seluruh Aceh yang berkedudukan di Kutaraja.<sup>100</sup>

Pendidikan agama pada umumnya sangat merosot. Pendidikan agama di rumah tangga amat lesu, pendidikan agama di *meunasah-meunasah* kampung dan mesjid-mesjid amat sulit karena sukarnya mendapat minyak lampu, sebagian dari *dayah-dayah* seluruh Aceh menjadi sepi malah ada sebagian yang kosong. Dalam hal pendidikan agama, Jepang mengangkat seorang ulama yaitu Tgk. Ismail Yakub, sebagai Pemeriksa Sekolah Agama Seluruh Aceh atau *Shu-shu Kyo-Gakku Shigakku*, yang bertugas mengadakan pengawasan atas pendidikan agama.<sup>101</sup>

Suatu hal yang menguntungkan dalam pendidikan di zaman Jepang adalah adanya pendidikan kemiliteran. Dengan adanya pendidikan kemiliteran, rakyat telah mampu mempertahankan negara dari agresi-agresi Belanda setelah Indonesia dinyatakan merdeka. Pendidikan kemiliteran yang diberikan kepada rakyat ialah *giyu gun*, *heiho*, dan *tokubetsu keisatsu tai*.

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm. 186-187.

<sup>100</sup> *Ibid.*, hlm. 187-188.

<sup>101</sup> Amin, *Sejenak*, hlm. 67.



Kebanyakan pemuda yang mengikuti pendidikan militer *Giyu Gun* berasal dari anak-anak *uleebalang*, bekas pasukan *Fujiwara Kikan*, dan anak-anak tokoh ulama PUSA. Secara khusus dicari pemuda yang cakap, kecuali mereka yang mendapat prioritas karena pertimbangan politis, seperti bekas anggota pasukan F yang telah berjasa sebagai kolone ke-5 sewaktu Jepang mendarat dan anak-anak bangsawan.<sup>102</sup> Penyusunan *Giyu Gun* ini diserahkan kepada MAIBKATRA untuk mengerahkan pemuda-pemuda memasuki tentara garis kedua ini.

Untuk mengerahkan tenaga yang bisa dibawa ke mana saja demi kepentingan militer Jepang maka dibentuklah *Heiho* dan *Romusha*. Mereka diberi latihan militer secukupnya. Pembentukan *Heiho* (pembantu tentara) dimaksudkan untuk membentuk kelompok-kelompok tenaga pekerja kasar yang langsung dan setiap saat dapat dikerahkan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat dan kasar bagi keperluan kesatuan tentara Jepang.<sup>103</sup> *Romusha* dibentuk untuk mengumpulkan dan mengarahkan tenaga kerja manusia secara paksa. Ketentuan *romusha* mengharuskan rakyat Aceh bekerja untuk kepentingan Jepang selama tujuh hari atau lebih dalam sebulan.<sup>104</sup>

Adapun yang menjadi motivasi pemuda-pemuda Aceh memasuki *giyu gun*, *heiho*, dan *tokubetsu keisatsu tai*, adalah janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan negaranya nanti dan dalam negara akan mendapatkan kedudukan yang baik. Selain itu hal yang sangat mendorong mereka memasukinya adalah untuk menghindari kewajiban-kewajiban *romusha* yang memberatkan rakyat.

<sup>102</sup> Ibrahim dkk., *Sejarah Daerah*, hlm. 189.

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm. 190.

<sup>104</sup> Jakobi, *Aceh*, hlm. 102.



### C. Dampak Penjajahan Jepang Terhadap Rakyat Aceh.

Tidaklah mengherankan, apabila pada suatu saat keinsyafan timbul dalam hati sanubari rakyat, bahwa Jepang hanya memberikan janji-janji kosong. Pada masa itu baik kehidupan sosial maupun ekonomi adalah sangat sulit. Tenaga rakyat pada umumnya dipergunakan sebagai *romusha* demi kepentingan Jepang, baik kepentingan militer atau pertahanan, dan kepentingan ekonomi, yang menyebabkan rakyat tidak mampu, bahkan tidak sempat bekerja untuk kepentingan pribadi mereka. Rakyat menderita akibat persiapan-persiapan pertahanan Jepang yang membutuhkan berpuluh ribu, bahkan beratus ribu tenaga *romusha* untuk mereka kerahkan membuat parit, lapangan terbang, dan jalan-jalan.

Padi rakyat harus dikumpulkan dalam jumlah besar untuk perbekalan tentara, kadang-kadang sampai 80% dari panen harus diserahkan kepada pemerintah. Jepang lebih kejam daripada Belanda yang digantikannya dengan pajak dan rodinya. Rakyat menderita; di desa-desa kelihatan rakyat kurus dan pucat, berpakaian compang-camping, serta menderita berbagai penyakit yang tidak dapat diobati lagi.<sup>105</sup>

Apabila orang-orang tidak mau memberikan padi kepada BDK, rakyat akan dikenakan berbagai hukuman terutama hukuman fisik. Akibatnya terjadi perampasan padi rakyat oleh pemerintah lewat BDK. Tidak jarang rakyat menderita kelaparan sebab yang diambil adalah padi yang sifatnya lebih untuk keperluan keluarga. Karena itu timbullah berbagai cemoohan kepada pemerintah terutama kepada BDK yang dilontarkan oleh rakyat, seperti BDK dengan

---

<sup>105</sup> Nasution, *Sekitar Perang*, hlm. 127.

kepanjangan Bagi dan Kumpul, kemudian lebih terkenal lagi di hati rakyat dengan sebutan "*Bah Di Koe*" (biar untuk aku) dan "*Bek Di Kah*" (tidak untuk kamu). Akibatnya dari usaha-usaha perampasan ini banyak rakyat yang mengganti bahan makanan pokoknya yaitu beras ditukar dengan jenis makanan lain seperti sagu dan ubi,<sup>106</sup> bahkan rakyat sangat sulit memperoleh bahan-bahan keperluan sehari-hari seperti kain dan minyak tanah.

Kehidupan sosial rakyat yang sangat menyedihkan ini, dapat dilihat ketika rakyat selalu dikerahkan untuk mengerjakan proyek-proyek besar demi kepentingan bangsa Jepang, seperti proyek jalan raya Takengon-Blang Kejeren dan proyek pertahanan gunung setan di Tanah Alas. Proyek jalan raya Takengon-Blang Kejeren dimulai pada 1 Januari 1944 dan selesai pada awal bulan Juli 1944. *Romusha* yang dikerahkan untuk mengerjakan proyek ini ditarik dari daerah Aceh sendiri dan dilakukan oleh sebuah badan yang bernama Perkumpulan Pekerja-Pekerja Untuk Umum Di *Aceh Syu* untuk membina Asia Raya. Dengan demikian dapatlah dimengerti betapa besarnya pengorbanan yang harus diberikan oleh rakyat melalui *romusha*, yang menyebabkan rakyat tidak dapat menyelenggarakan kehidupan sosial yang lebih layak.<sup>107</sup>

Demikian juga dalam pendidikan secara umum mengalami kemunduran, jika dibandingkan dengan keadaan pendidikan pada akhir penjajahan Belanda. Kehidupan kesenian pada masa ini sama sekali tidak berkembang. Rakyat pada masa ini tidak mempunyai waktu untuk melahirkan karya-karya seni seperti waktu-waktu sebelumnya. Di beberapa tempat, misalnya di pesantren-pesantren

---

<sup>106</sup> Ibrahim dkk., *Sejarah Daerah*, hlm. 184-185.

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm. 183.

kebanyakan mereka hanya membaca hikayat perang sabil yang semata-mata untuk membangkitkan semangat guna melanjutkan perjuangan menentang pemerintah militer Jepang yang dirasakan kekejaman dan kezalimannya.

Pada awal pemerintahan Jepang, tidak banyak perhatian diberikan kepada Islam sebagai satu agama. Agama Shinto yang dianut oleh Jepang memperbolehkan memakan babi, padahal makanan tersebut diharamkan oleh agama Islam yang dianut oleh rakyat Aceh. Bagi orang Jepang kebiasaan tersebut bukan merupakan hal yang dilarang baik oleh agama maupun oleh tradisi yang mereka miliki. Belum lagi upacara menundukkan kepala ke arah matahari terbit dengan cara rukuk (membungkuk) yang disebut upacara *seikeire*. Berbagai adat kebiasaan orang-orang Jepang dan upacara yang sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam inilah yang membuat rakyat marah dan memulai perlawanan.<sup>108</sup>

Selain itu Bendera merah putih tidak boleh dikibarkan lagi, hanya *Hinomaru* yang boleh dikibarkan. Lagu Indonesia Raya dilarang dan hanya *Kimigayo* yang boleh dinyanyikan. Jepang memerlukan berbagai fasilitas untuk mendukung pasukannya dalam Perang Dunia II. Berbagai prasarana yang dibutuhkan dibangun secara tradisional dengan mengerahkan tenaga rakyat dan memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di tempat. Ini merupakan beban berat bagi rakyat Aceh yang harus dibayar tidak hanya dengan tenaga dan harta tetapi juga dengan nyawa.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> Jakobi, *Aceh*, hlm. 100.

<sup>109</sup> *Ibid.*, hlm. 100-101.



## BAB IV

### REAKSI ULAMA ACEH TERHADAP JEPANG

#### A. Perlawanan Teungku Abdul Jalil

Setelah beberapa bulan pemerintahan Jepang menduduki Aceh yang dimulai bulan Maret 1942, terjadilah perlawanan pertama dari rakyat yang terjadi pada tanggal 10 November 1942 yang dipimpin oleh Tgk. Abdul Jalil. Perlawanan ini merupakan reaksi pertama umat Islam Indonesia terhadap penjajahan Jepang. Saat itu kebanyakan dari ulama-ulama masih berterima kasih dan berpropaganda untuk Jepang. Ia menganut sikap berlawanan dengan sikap pemuda PUSA yang bergabung dalam gerakan *Fujiwara Kikan*.<sup>110</sup>

Tgk. Abdul Jalil lebih dikenal dengan nama panggilan sehari-hari yaitu Tgk. Cot Plieng atau Tgk. di Bulah. Dia dilahirkan di Desa Blang Ado Buloh, Blang Ara, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara sekitar tahun 1912. Ayahnya bernama Tgk. Puetea Hasan Kepala Kampung Cot Seumuyong Kuta Makmur Aceh Utara dan ibunya Cut Buleum seorang guru ngaji di kampung yang juga keturunan ulama.<sup>111</sup>

Tgk. Abdul Jalil belajar di *Volkshcool* dan setelah keluar dari *Volkshcool* secara terus menerus belajar agama dan bahasa Arab di *dayah-dayah* terkenal antara lain di Bireunghang, Ie Rhot Bungkaih (Muara Batu), Tanjung Samalanga, Mon Geudong, Cot Plieng, Krung Kale (Banda Aceh), Teuping Pungti dan pada tahun 1937 kembali ke *dayah* Cot Plieng, di bawah pimpinan Tgk. Alimad.

---

<sup>110</sup> Harun Nasution (ed.) dkk., *Ensiklopedi Islam Jilid 1* (Jakarta: Depag RI, 1993), hlm. 14.

<sup>111</sup> Ibrahim dkk., *Sejarah Daerah*, hlm. 196.



Setelah Tgk. Ahmad meninggal dunia pada tahun 1937, secara resmi Tgk. Abdul Jalil diangkat menjadi pimpinan *dayah* Cot Plieng.<sup>112</sup>

Selama ia memimpin *dayah* Cot Plieng, banyak terjadi perubahan-perubahan, dia mengadakan hubungan dengan *dayah-dayah* lain yang terikat di seluruh Aceh. Bahkan untuk memajukan *dayah* yang dipimpinnya, Tgk. Abdul Jalil pernah mengunjungi beberapa *dayah* sampai ke Aceh Selatan.

Dengan masuknya tentara Jepang ke Aceh, rupanya ia tidak terpengaruh dengan propaganda yang dilancarkan oleh Jepang, PUSA, serta barisan-barisan *Fujiwara Kikan*. Ia tidak sepakat dengan beberapa ulama yang tergabung dalam PUSA yang membantu pemasukan dan penerimaan Jepang di Aceh.

Sejak bulan Agustus 1942, Tgk. Abdul Jalil dan para pengikutnya telah melanggar perintah dan peraturan pemerintahan Jepang secara terang-terangan dan mengadakan pertemuan di rumahnya.<sup>113</sup> Pada pertengahan bulan Agustus 1942, di depan murid-murid pesantren di dekat Pantan Labu ia berkhotbah bahwa dunia ini akan kiamat, karena *dajjal* (pembawa malapetaka) sudah datang. Dari dia, lahir kata bersayap, *Ta Let asee, jitamong buy* (kita usir anjing, (kemudian) masuk babi).<sup>114</sup>

Seorang *uleebalang* setempat, T. Chik Abdul Latif sebenarnya telah mengetahui akan persiapan Tgk. Abdul Jalil. Dengan mengharapkan akan mendapatkan "pahala" dari Jepang, T. Chik Abdul Latif kemudian menyusun rencana untuk mengambil keuntungan dari perlawanan ini. Akan tetapi ia membiarkan saja Tgk. Abdul Jalil mengorganisir pengikut-pengikutnya di daerah

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm. 197.

<sup>113</sup> Shiraishi, "Pemerintahan Militer", hlm. 51.

<sup>114</sup> IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam jilid 1*, hlm. 15.

itu. Lawan-lawan politik dari kalangan *uleebalang* segera melaporkan tentang gerakan Tgk. Abdul Jalil yang menuduh Jepang sebagai *dajjal* dan telah mengorganisir pengikutnya untuk memberontak kepada Jepang.<sup>115</sup>

Jepang bertindak dengan hati-hati sekali. *Cokan* Iino meminta nasihat dari para pemuka rakyat di Banda Aceh. Oleh pemuka-pemuka rakyat, Jepang dianjurkan untuk menempuh jalan damai. Oleh karena itu dikirimlah sejumlah ulama ke sana, yang praktis sudah menjadi alat kekuasaan pihak Jepang. Maksud kedatangan mereka ialah untuk berdebat mengenai *dajjal*, tetapi Tgk. Abdul Jalil tetap pada pendiriannya, tidak mungkin berdebat dengan *dajjal* mengenai *dajjal*.<sup>116</sup>

Situasi mulai retak antara Tgk. Abdul Jalil dengan Jepang. Selanjutnya ia mulai mempersiapkan usaha-usaha guna menghadapi setiap kemungkinan yang akan terjadi. Di antara persiapan-persiapan yang dilakukan ialah berlatih mengenai cara-cara menggunakan tombak, pedang, rencong, dan parang. Bertindak sebagai pelatih adalah Teungku sendiri, Tgk. Muhammad Taib (adik ipar), Tgk. Cahi, dan Tgk. Cot Rameh. Selain itu siang malam berkumandangnya suara orang bertahlil di dalam masjid, memohon rahmat dan berkah dari Allah. Tgk. Abdul Jalil telah mempersiapkan mental murid-muridnya dengan membacakan hikayat Perang Sabil. Setiap malam mereka membaca *rateb* (dzikir).<sup>117</sup> Sekeliling masjid Cot Plieng dibuat suatu batas dengan benang putih yang tidak boleh dilangkahi oleh Jepang. Jihad mereka ialah sabil.

<sup>115</sup> Al-Chaidar, *Aceh Bersimbah*, hlm. 24-25.

<sup>116</sup> Nasution, *Sekitar Perang*, hlm. 130.

<sup>117</sup> Nur Rokhim, "Ulama dan Politik Islam Pemerintahan Jepang" dalam Jurnal *Ma'aniya*, No. 2 Surabaya, 2002, hlm. 99.

Ketika mendengar kesiapan pasukan perlawanan itu, Jepang segera mengajak Tgk. Abdul Jalil untuk berunding, tetapi ajakan itu ditolak. Jepang masih berusaha untuk melakukan pendekatan serta berusaha untuk membujuk dengan mempergunakan berbagai cara. Berkali-kali melakukan pemanggilan bertingkat mulai dari *Kempetai Co* (komandan polisi militer Lhok Seumawe), disusul oleh bupati (*bunshu-cho*) Sigli, dipanggil lagi oleh komandan *Kempetei* Aceh, tetapi Tgk. tetap tidak memperdulikan. *Uleebalang-uleebalang* yang berpengaruh seperti T. Mahmud, Abdul Azis, dan ulama-ulama lainnya bahkan bekas gurunya sendiri Tgk. Haji Hasan Krueng Kale, diutus untuk membujuk, namun usaha mereka sia-sia.<sup>118</sup>

Jepang belum berani bertindak melewati garis batas, karena masih berharap dapat melemahkan semangat pasukan Tgk. Abdul Jalil dengan membariskan tank-tank dihadapannya, tetapi usaha Jepang sia-sia. Maka pada tanggal 10 November 1942 pukul 04.15 dini hari, pasukan Jepang yang berada di Bireuen, Lhok Seumawe, dan Lhok Sukon dengan kekuatan 500 personil dipersenjatai senapan-senapan mesin, dan tiga pucuk meriam datang menyerbu Cot Plieng.<sup>119</sup>

Pada waktu itu azan subuh sedang berkumandang di masjid Cot Plieng, Jepang mulai melancarkan serangan. Pihak Jepang beranggapan bahwa pada waktu itu tentu semua orang yang ada di masjid sedang melakukan sembahyang, tetapi Jepang salah sangka. Jepang tidak tahu bahwa kaum muslimin yang berada

<sup>118</sup> Ibrahim dkk., *Sejarah Daerah*, hlm. 198-199.

<sup>119</sup> Nur Rokhim, "Ulama dan Politik", hlm. 99.

dalam peperangan melakukan sembahyang perang, yakni mereka harus waspada juga terhadap kemungkinan serangan umum.<sup>120</sup>

Sore harinya pihak Jepang melancarkan lagi serangannya, dengan mengerahkan pasukan yang berlipat ganda. Sebelum serangan dilancarkan, komando Jepang mengirimkan ultimatum sekali lagi, supaya pasukan Tgk Abdul Jalil menyerah. Ultimatum pihak Jepang kontan dibalas dengan tembakan. Menjelang hari ketiga masjid terbakar, di samping itu pasukan Tgk. Abdul Jalil telah banyak yang gugur dalam pertempuran.

Tgk. Abdul Jalil beserta pengikutnya mengundurkan diri ke Masjid Paya Kambok di Kecamatan Merurah Mulia dan melalui Desa Neuheun dan bermarkas di Desa Neuheun ini, di rumah panglima Perang Ahmad. Di tempat ini pula terjadi pertempuran yang kedua. Dalam pertempuran ini gugur lagi empat orang syuhada yaitu dua orang pria dan dua orang wanita. Dari Desa Neuheun Tgk. Abdul Jalil mengundurkan diri setelah terjadi penyerbuan ini, menuju Desa Bulouh Gampoung Tengah.<sup>121</sup>

Setelah melakukan perjalanan dua hari, bertempat di *Meunasah* Blang Buduh Gampoung Tengah terjadilah pertempuran yang paling dahsyat. Penyerangan ini dilakukan oleh Jepang setelah Tgk. Abdul Jalil melaksanakan sembahyang Jum'at. Dalam pertempuran ini syahidlah Tgk. Abdul Jalil, setelah berjuang mempertahankan agama dan tanah air. Jenazahnya dibawa ke Lhok Seumawe. Keluarganya dibawa kembali ke Bayu dan dikuburkan di kompleks *dayah* Cot Plieng.<sup>122</sup>

---

<sup>120</sup> Nasution, *Sekitar Perang*, hlm. 131.

<sup>121</sup> Ibrahim dkk., *Sejarah Daerah*, hlm. 200.

<sup>122</sup> *Ibid.*, hlm. 200.



Setelah pertempuran selesai, dilakukan pembersihan dan penelitian terhadap penduduk. Seluruh rakyat dikumpulkan bersama-sama untuk pemeriksaan yang berlangsung berminggu-minggu lamanya. Seluruh daerah Lhok Seumawe, Lhok Sukon, dan Bireun di razia. Semua senjata rakyat disita, termasuk rencong. Orang yang dianggap ada hubungannya dengan Tgk. Abdul Jalil ditangkap dan kemudian dihukum.<sup>123</sup>

## **B. PUSA Pada Masa Pendudukan Jepang**

Sebelum PUSA berdiri, sudah beraksi beberapa partai politik seperti partai Syarekat Islam Indonesia dalam mengobarkan semangat perlawanan rakyat. Sejak peristiwa PKI tahun 1927, Belanda melarang pendirian partai politik pribumi apalagi berdasarkan Islam. Untuk menyiasati hal tersebut, PUSA mengidentifikasi diri sebagai organisasi agama non politik yang berpolitik.

Kecurigaan Belanda beralasan karena sebelumnya banyak organisasi politik yang berlandaskan agama dirasakan sangat mengganggu aktivitas politik pemerintah kolonial. Apalagi kedudukan Belanda beberapa waktu itu dalam posisi sulit dan lemah dikarenakan sebuah berita yang mengejutkan bahwa negeri Belanda bersama Belgia dan Perancis ditaklukkan Jerman pada tanggal 10 Mei 1940.<sup>124</sup>

Gerakan politik ulama semakin terlihat ketika digelarnya kongres pertama PUSA yang dilangsungkan di kota Blang Asam Sigli, tepat pada hari ulang tahun PUSA yang pertama tanggal 12-16 Rabi'ul Awal 1359 H bertepatan dengan 20-24

<sup>123</sup> Nsution, *Sekitar Perang*, hlm. 132.

<sup>124</sup> Ramadhan dan Hamid Jabar, *Autobiografi Syaikh Gaharu, Cuplikan Perjuangan di Daerah Modal* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 23.



April 1940.<sup>125</sup> Dalam kongres ini ribuan massa datang dari segala penjuru Aceh. Pemerintah Belanda sebelumnya tidak menaruh perhatian atas kelahiran PUSA, tetapi mereka mulai menangkap suatu gejala luar biasa ketika melihat adanya dukungan massa saat itu. PUSA yang selama ini disangka hanya sekedar perkumpulan ulama ternyata sebuah organisasi massa (ormas) yang memiliki pengikut cukup banyak.

Kongres PUSA di kota Blang Asam Sigli mempunyai tiga aspek politik yang patut dicatat. Pertama: kongres menetapkan Tgk. M. Daud Beureueh sebagai ketua PUSA. Kedua: kongres merekomendasikan pembentukan divisi kepanduan yang dinamakan pemuda PUSA di bawah komando Tgk. Amir Husein. Ulama muda dari Idi ini tiba-tiba menyediakan dirinya memimpin barisan pemuda PUSA dengan berteriak "saya sanggup" memimpin. Dengan permulaan yang khas ini, ia kemudian diberi gelar *al-Mujahid* (pejuang), ia ditetapkan sebagai pemimpin pemuda PUSA dengan markas besarnya di Idi.<sup>126</sup> Ketiga: kongres menetapkan untuk membuat penerbitan guna menyuarakan program-program PUSA, di samping itu, untuk mengimbangi propaganda pers (jurnal) mingguan Belanda *Atjeh Nieuwsblad*. Setelah itu beredarlah terbitan periodik yang didistribusikan pertama sekali pada Nopember 1940 dengan mengambil bentuk majalah mingguan dengan Tgk. Ismail Jakob sebagai pemimpin redaksi. Majalah ini bernama *Penjoeloh*.<sup>127</sup>

Untuk mengusir Belanda dari Aceh, PUSA mencari dan mendapat sekutu pada Jepang untuk melawan Belanda. Melalui perantara orang-orang Aceh yang

<sup>125</sup> IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Jilid I*, hlm. 961.

<sup>126</sup> Anthony Reid, *Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 59.

<sup>127</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

berdiam di Malaya dilakukan hubungan dengan orang Jepang dan dibuat rencana untuk mengadakan perlawanan anti-Belanda menjelang pendaratan Jepang di Hindia Belanda.

Pendaratan Jepang di Aceh, disambut dengan gembira oleh rakyat Aceh. Awalnya rakyat berharap Jepang akan melindungi Islam, namun yang terjadi adalah setiap pagi diwajibkan melaksanakan upacara *seikeire*. Hal ini sudah pasti sangat kontradiktif dengan ajaran Islam.

Untuk mencari solusi akibat pengkhianatan Jepang, pemimpin PUSA mengadakan rapat untuk membaca situasi yang berkembang. Menurut mereka realitas sosial kontekstual tidak banyak berarti bagi pemekaran penghayatan Islam secara total dan universal. Hadirnya realitas sosial yang menafikan fungsi-fungsi syariat Islam harus dilawan dengan segala cara sebagai simbol interaktif dengan pengetahuan. Beranjak dari berbagai masukan, rapat menghasilkan keputusan kerjasama dengan Jepang tidak dapat dilanjutkan lagi. Walaupun harus dipertahankan hanya sebatas kerjasama taktis untuk menghindari jatuh korban yang lebih banyak.<sup>128</sup> Sementara untuk kebutuhan konsolidasi PUSA mengutus T. M. Amin dan A. Hasjmy untuk menyampaikan ide ini ke pimpinan Jam'iyat Washliyah di Medan dan bersepakat untuk tidak mempercayai lagi fasisme Jepang.

Kemudian dalam usaha mensosialisasikan ide-ide revolusioner. PB-PUSA mengedarkan brosur gelap kepada para pemimpin pemuda PUSA seluruh Aceh. Brosur tersebut menulis laporan terperinci mengenai perlawanan di seluruh Aceh dan sebagian besar memuat peranan PUSA dan menyebut tentang tidak

---

<sup>128</sup> A. Hasjmy, *Semangat Merdeka* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm. 111.

populernya *uleebalang*. Tetapi ternyata ada beberapa brosur yang jatuh ke tangan Jepang dan tentu konsekuensinya beberapa pengurus teras PUSA/pemuda PUSA seperti Tgk. Muhammad Daud Beureueh, Tgk. Abdul Wahab Seulimeum, Abu Bakar Adamy, dan Husin al- Mujahid di interogasi dan dipenjara. Hasil pemeriksaan ternyata tidak membuktikan pemimpin PUSA/pemuda PUSA hendak memberontak.<sup>129</sup>

Jepang akhirnya menyadari tanpa pengaruh ulama untuk memobilisasi rakyat, pasti banyak pekerjaan fisik seperti membangun lapangan pesawat terbang Sumatera atau tangsi perlindungan akan terhenti.

Jepang *Atjeh Syu Chokan* membentuk Mahkamah *Syar'iyah* yang diserahkan kepemimpinannya pada Tgk. M. Daud Beureueh, Tgk. Hasballah Indrapuri, Tgk. Haji Ja'far Lamjabat, dan Tgk. M. Hasbi Ash Shiddieqy. Hingga akhirnya untuk benar-benar bisa memenuhi aspirasi PUSA, seorang ketua pengadilan tinggi Bala Tentara Jepang di Aceh yang pro-ulama, Aoki Eigoro, membentuk pengadilan tinggi yang bebas dari pengaruh *uleebalang* dengan pengangkatan para ulama sebagai hakim-hakimnya.<sup>130</sup> Pada tahap ini, *Shiho-bucho* Aoki mengambil prakarsa untuk memperkuat pengaruh PUSA melalui pembaharuan sistem peradilan.

Rencana pembaharuan ini pada dasarnya adalah untuk mengadakan dua sistem *hoin* (pengadilan), yaitu agama dan sekuler. Pengadilan sekuler (*hoin*) akan didirikan pada tingkat *son* (kecamatan), *gun* (kewedanaan), dan *lunshu* (kabupaten). Rencana pengadilan agama pada dasarnya adalah sebagai berikut:

<sup>129</sup> *Ibid.*, hlm. 111-112.

<sup>130</sup> M. Nur el-Ibrahimi, *Teungku Muhammad Daud Beureueh*, hlm. 40.

*shu-kyo-hoin* (pengadilan tinggi agama) di Kutaraja yang terdiri dari ulama-ulama terkemuka akan mengawasi operasi pengadilan-pengadilan dan mengambil alih wewenang *uleebalang* dalam pengangkatan *khadi*, *kodi-son-hoin* (di setiap daerah *uleebalang*), *teungku meunasah* (di setiap *gampong* atau desa). Sistem ini bermaksud untuk menghapus pengaruh *uleebalang* dalam pengadilan agama, karena para anggota *syu-kyo-hoin* lah yang mengangkat *khadi*, dan *teungku meunasah* langsung berada di bawah kekuasaan *khadi*, dan bukan lagi di bawah *uleebalang*.<sup>131</sup>

Setelah mendapatkan dukungan tentang perubahan-perubahan tersebut, Aoki berhasil menggerakkan *Chokan* Iino mengumumkannya secara resmi pada tanggal 1 Januari 1944. Para *uleebalang* yang menjadi penasehat-penasehat Iino hanya berdiam diri, dengan perkiraan semua pengangkatan staf pengadilan sekuler yang baru akan diserahkan kepada wewenang *guncho/soncho*, dengan demikian *uleebalang* akan tetap menguasai pengadilan-pengadilan baru tersebut. Tidak demikian, Aoki segera menemui pengurus PUSA dan meminta ribuan nama yang diperlukannya untuk mengisi staf pengadilan di seluruh Aceh. Tiga syarat yang diajukan Aoki ialah mereka yang diajukan harus mendapat kepercayaan rakyat, berpengetahuan sepenuhnya tentang adat, dan memiliki keberanian untuk menolak campur tangan *uleebalang*.<sup>132</sup> Kelompok PUSA menyambut dengan gembira, sehingga pada tanggal 1 Maret kaum *uleebalang* kehilangan kekuasaannya atas pengadilan.

<sup>131</sup> Shiraishi, "Pemerintahan Militer", hlm. 60.

<sup>132</sup> Reid, *Perjuangan Rakyat*, hlm. 211.



Terbentuknya pengadilan agama merupakan suatu kemenangan simbolis yang besar bagi kaum muslimin di seluruh Aceh. Pertentangan-pertentangan di dalam dan di sekitarnya membuat pengadilan agama jauh dapat berguna sebagai senjata perjuangan, dibandingkan pengadilan sekuler. Dalam prakteknya peranannya hanya terbatas kepada menyetujui pengangkatan-pengangkatan *kadhi*, itu pun jika ikut disetujui oleh *uleebalang* yang bersangkutan. Mulanya Iino berusaha untuk mencegah agar pengadilan-pengadilan itu tidak dijadikan senjata oleh PUSA dengan mengangkat pemimpin Muhammadiyah, Hasbi, sebagai ketuanya. Namun, ini mengundang konfrontasi dengan Tgk. Daud Beureueh yang terang-terangan mengatakan lebih baik mengundurkan diri daripada bekerja di bawah Hasbi.<sup>133</sup> Pada tanggal 17 Juli Iino berhasil mengangkat tokoh kompromi Tgk. Lamjabat.

Semua tokoh perintis penting dari perubahan yang membawa pertentangan-pertentangan ini telah diberhentikan oleh Iino, karena seluruh peristiwa ini telah menciptakan suasana ricuh yang sam sekali tidak diduga. Aoki dikirim kembali ke Singapura pada bulan Mei 1944.

Pada tanggal 3 Juli 1945, Masubuchi berhenti dari jabatannya dalam *sang-yo-kei-zai-bu* (bagian industri), untuk memusatkan kegiatannya ada pembentukan *Masubuchi Kikan*, yang akan menciptakan jaringan kegiatan gerilya di Aceh. Anggota utama dalam organisasi ini adalah teman lamanya, Said Abu Bakar, T. Panglima Polim Muhammad Ali, dan Tgk. Muhammad Daud Beureueh. Said Abu Bakar adalah ketua *Aceh-hoko-kai* dan pernah menjadi pemimpin organisasi F di

---

<sup>133</sup> *Ibid.*, hlm. 213-214.



Aceh Besar, sedangkan Tgk. Daud Beureueh adalah ketua PUSA dan anggota terkemuka sistem peradilan di Pidie.<sup>134</sup>

### C. Perlawanan Ulama di Pandrah

Perang Bayu (perlawanan Tgk. Abdul Jalil) hanya terjadi beberapa bulan setelah Jepang menginjakkan kakinya di Aceh dan Perang di Pandrah, *landschap* Jeunieb, kabupaten Bireuen justru terjadi hanya tinggal beberapa bulan lagi saat Jepang meninggalkan Aceh. perlawanan ini terjadi dikarenakan persoalan padi dan *romusha*. Kerja paksa yang dilakukan pihak Jepang terlalu memakan waktu lama, sehingga hampir tidak ada waktu untuk menggarap sawah. Di samping itu sawah-sawah telah penuh ditancapi bambu runcing oleh Jepang dengan maksud supaya tidak dipergunakan pihak lawan untuk mendarat pasukan panyung. Tindakan ini sangat merugikan rakyat, tetapi Jepang tidak mau tahu kerugian yang diderita rakyat. Malah rakyat diharuskan lagi menyetorkan hasil panennya 50% sampai 80%.<sup>135</sup> Selain itu juga karena tiga tahun lebih di bawah tangan Jepang, rakyat sangat merasakan akibat-akibat dari kekejaman Jepang. Maka timbullah berbagai daya upaya untuk melepaskan diri dari perampasan dan kerja paksa di antaranya dengan jalan peperangan.

Sebagai langkah pertama, pada tanggal 24 April 1945 *Keuchik* (Kepala Kampung) Lheue, Oesman memprakarsai rapat dengan memanggil beberapa tokoh terkemuka untuk bermusyawarah guna mengadakan perlawanan terhadap Jepang. Rapat tersebut diselenggarakan di Lheue Simpang. Salah satu ulama yang

<sup>134</sup> Shiraishi, "Pemerintahan Militer", hlm. 67.

<sup>135</sup> Nasution, *Sekitar Perang*, hlm. 133.

bernama Tgk. Ibrahim Peudada dalam musyawarah itu menyarankan, sebelum melakukan penyerangan terlebih dahulu berkumpul di suatu tempat yang bernama *Glee Banggalang* (Gunung Banggalang). Dalam musyawarah itu, diputuskan sebagai pemimpin untuk melakukan penyerangan adalah Tgk. Ibrahim Peudada sendiri.<sup>136</sup>

Kebetulan di dekat bukit kampung itu, ada seorang peladang bernama Muhammad Daud. Ia berasal dari Peudada. Sewaktu orang-orang masuk *giyu gun*, ia pun ikut memasukinya, tetapi ia tidak tahan menerima pukulan yang sering dialaminya dan melarikan diri dari asrama *giyu gun*. Ia tidak berani pulang ke kampungnya di Peudada, karena takut akan ditangkap. Oleh karena itu, ia memilih tempat tinggal di bukit dekat kampung Lheue, Pandrah, sambil berladang sebagai pencahariannya. *Keuchik* Djohan (putra *Keuchik* Oesman) mengajak bekas *giyu gun* itu untuk melatih *Keuchik* Djohan dan pengikut-pengikutnya yang sudah mendaftarkan diri sebanyak 80 orang. Untuk menambah semangat, setiap malam di *meunasah* kampung dibacakan *Hikayat Prang Sabi*.<sup>137</sup>

Penyerangan pertama terhadap tangsi Jepang di Pandrah dilakukan pada 2 Mei 1945 di bawah pimpinan *Keuchik* Djohan dan Panglima Perang Tgk. Jakob. Penyerangan ini dilakukan pada malam hari sewaktu tentara Jepang sedang tidur. Tentara Jepang yang menjaga pos Pandrah ini ternyata hanya 3 orang dan satu orang sempat meloloskan diri serta melapor ke asrama Jeunieb. Laporan ini segera diteruskan ke Bireuen, Lhok Seumawe, Sigli, dan Banda Aceh. Dengan kejadian

<sup>136</sup> Ibrahim dkk., *Sejarah Daerah*, hlm. 201.

<sup>137</sup> Abdullah (ed.), *Agama dan Perubahan*, hlm. 75.

ini pihak Jepang tidak tinggal diam dan mereka tidak menginginkan terulangnya peristiwa di Bayu.<sup>138</sup>

Pada 3 Mei 1945 satu kompi tentara Jepang dari Bireuen diperintahkan datang ke Pandrah. Dari Sigli datang wakil *bunshu-cho*, *Gun-cho* Bireuen T. Muhammad Jakob, dengan dua regu polisi. Mereka tidak mendapatkan orang-orang yang telah melakukan penyerangan, karena telah kembali ke Glee Banggalang.<sup>139</sup> Akhirnya menjelang waktu dzuhur hari Kamis tanggal 3 Mei, dikirimlah satu tim penyelidikan yang terdiri dari orang-orang Aceh., yaitu T. Muhammad Jakob (*gun-cho* Bireuen), Husin Yusuf dari *giyu gun*, T. H. Zainul Abidin, dan Tgk. H. Syekh Abdul Hamid, dengan maksud agar mereka menyerah dan persoalan ini diselesaikan dengan cara damai.

Besok paginya, hari Jum'at tanggal 4 Mei 1945, pasukan muslimin dari Glee Banggalang mengadakan penyerangan ke tempat kongsiyasi Jepang di Kampung Lheue Simpang di bawah pimpinan Tgk. Ibrahim Peudatã Para pemberontak turun dari gunung untuk menyerang Jepang di pagi hari, selagi tentara Jepang dan *giyu gun Tokubetu-keisatu-tai* (polisi istimewa) sedang asyik membersihkan senjata mereka<sup>140</sup>. Mereka menebas orang-orang Jepang satu persatu, wakil *bunshu-cho* dan serdadu-serdadu Jepang termasuk *gun-cho* sendiri (T. Muhammad Jakob) yang dikira oleh rakyat sebagai Jepang.

Dalam pertempuran tersebut berjatuhlah korban-korban dari kedua belah pihak. Di pihak kaum muslimin yang gugur sebanyak 43 orang dan seorang wanita (Siti Aminah) yang sedang hamil tua. Mereka kesemuanya dikuburkan di

<sup>138</sup> Ibrahim dkk., *Sejarah Daerah*, hlm. 201.

<sup>139</sup> *Ibid.*, hlm. 201.

<sup>140</sup> Abdullah (ed.), *Agama dan Perubahan*, hlm. 77.

kampung Lheue Simpang dan terkenal dengan nama kuburan *Peuet plooh peuet* (empat puluh empat), karena dimasukkannya bayi yang masih dalam kandungan. Di pihak Jepang yang gugur dalam pertempuran ini lebih banyak lagi, mencapai 200 orang dan korban-korban ini dibawa pulang ke Pandrah. Perang Pandrah ini merupakan perlawanan rakyat terakhir menjelang Jepang meninggalkan Aceh.<sup>141</sup>

Jepang menyerah tiba-tiba pada bulan Agustus 1945, tetapi Jepang masih belum mengumumkan secara resmi kekalahannya dalam perang Asia Timur Raya. Menurut Residen Shazaburo Iino, posisi Jepang sudah berdamai dengan sekutu dan dipertegas bahwa Jepang tidak kalah tetapi berdamai. Hal ini awalnya menimbulkan kekacauan di antara orang-orang Aceh yang telah berpartisipasi dalam gerakan-F dan telah bekerja sama dalam usaha perang Jepang, bahkan ada yang sampai meninggalkan Aceh.<sup>142</sup>

Berita tentang proklamasi kemerdekaan 17 Agustus di Jakarta telah tersebar luas di Aceh kendatipun agak terlambat. Pada waktu rakyat Aceh menerima kabar bahwa telah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yang mula-mula tergambar dalam pikiran rakyat ialah bahwa saat berbahagia yang selama ini dinanti-nantikan telah tiba yaitu saat akan berlaku Syariat Islam di tanah Aceh. Oleh karena itu, proklamasi kemerdekaan Indonesia disambut oleh seluruh rakyat Aceh dengan semangat jihad yang meluap-luap, tetapi para pemimpin di Aceh -yang kebanyakan ulama- masih curiga kepada Belanda yang akan membahayakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan memperingatkan bahwa kemungkinan mereka akan menjajah Indonesia kembali.

---

<sup>141</sup> *Ibid.*, hlm. 202.

<sup>142</sup> Shiraishi, "Pemerintahan Militer", hlm. 68.



Sehubungan dengan situasi tersebut, beberapa ulama melakukan pertemuan yang memutuskan untuk memberi dorongan kepada Republik Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaannya. Pertemuan itu, menghasilkan sebuah kesepakatan yang disebut "deklarasi seluruh ulama Aceh" yang ditandatangani oleh empat ulama terkenal, yaitu: Tgk. M. Daud Beureueh, Tgk. Ahmad Hasballah Indrapuri, Tgk. Ja'far Shiddiq, dan Tgk. Hasan Krueng Kale. Deklarasi ini telah mendorong rakyat untuk bersatu mendukung pemimpin besar Soekarno dalam perlawanan terhadap Belanda yang ingin kembali ke Indonesia, karena Belanda diyakini akan menghancurkan kemurnian agama dan juga menindas serta melecehkan kehormatan dan merintangi kemakmuran rakyat Indonesia.<sup>143</sup>

Pada tanggal 17 November 1945, beberapa ulama berkumpul di Masjid Baiturrahman dan membentuk angkatan perang Islam yang dinamai Laskar Mujahidin, untuk mengikuti perang suci. Laskar ini dipimpin oleh Tgk. M. Daud Beureueh, salah seorang ulama yang menandatangani deklarasi ulama. Didorong oleh semangat perang suci (jihad), rakyat Aceh berjuang dengan penuh semangat untuk mencapai tujuan mereka. Mereka yakin bahwa melalui *jihad fi sabilillah* mereka akan menang, karena jika mereka gugur akan masuk surga dan jika mereka selamat maka negara mereka akan bebas dari pendudukan Belanda.<sup>144</sup>

Agresi pertama Belanda pada 21 Juli 1947 gagal masuk ke Aceh. Agresi Belanda yang kedua dilakukan pada tanggal 19 Desember 1945. Belanda dapat menduduki ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta, dan menangkap presiden

---

<sup>143</sup> Amiruddin, *Perjuangan Ulama*, hlm. 55.

<sup>144</sup> *Ibid.*, hlm. 56.



(Soekarno), wakil presiden (Mohd. Hatta), dan beberapa menteri. Daerah yang tidak diduduki oleh Belanda hanya daerah Aceh. Untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, pemerintah membentuk pemerintahan darurat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawiranegara, yang memerintah dari hutan Sumatera Barat, dan kemudian di Aceh.<sup>145</sup>

Prawiranegara menghadapi masalah serius dalam pemerintahan darurat. Salah satu masalah yang paling krusial adalah sumber dana untuk membangun pemerintahan. Dia kemudian meminta kepada Aceh, karena hanya daerah tersebut yang dapat membantu. Ulama Aceh bersama pemimpin lainnya, mengajak rakyat dengan landasan agama memberikan harta mereka sebagai bantuan. Sebagai ungkapan terima kasih atas bantuan rakyat Aceh, pemerintah pusat menamakan pesawat tersebut "Seulawah", yaitu nama sebuah gunung di Aceh.<sup>146</sup> Dari peristiwa tersebut, jelas bahwa melalui usaha Tgk. M. Daud Beureueh dan ulama lain yang menegaskan bahwa Islam merupakan dasar perjuangan nasional, Aceh mampu mempertahankan diri dari pendudukan Belanda kembali.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>145</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

<sup>146</sup> *Ibid.*, hlm. 58.